



**LEMBARAN KALURAHAN KEDUNGPOH
NOMOR 3 TAHUN 2026**

**TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN KEDUNGPOH
TAHUN 2027**

**KAPANEWON NGLIPAR
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
8. Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Mekanisme Persetujuan Dari Kepala Desa Dalam

- Rangka Pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 593);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pedoman Sistem Informasi Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1015);
 10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 15 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026 Nomor 15);
 11. Peraturan Kalurahan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Daftar Kewenangan Kalurahan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan (Lembaran Kalurahan Kedungpoh Tahun 2025 Nomor 8);
 12. Peraturan Kalurahan Kedungpoh Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Kedungpoh Tahun 2020-2025 (Lembaran Kalurahan Kedungpoh Tahun 2020 nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan perkal nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan Peraturan Kalurahan Kedungpoh Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Kedungpoh Tahun 2020-2025 (Lembaran Kalurahan Kedungpoh Tahun 2026 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KEDUNGPOH
Dan
LURAH KEDUNGPOH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN KALURAHAN TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN KEDUNGPOH TAHUN 2027**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

BAB II

SISTEMATIKA RKP Kalurahan

Pasal 3

- (1) RKP Kalurahan Tahun 2027 sebagaimana dimaksud Pasal 2 disusun dengan sistematika :

BAB I. PENDAHULUAN

- a. Latar Belakang
- b. Dasar Hukum
- c. Tujuan
- d. Visi dan Misi Kalurahan

BAB II. GAMBARAN UMUM DAN KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN

- a. Gambaran Umum dan Potensi Wilayah
- b. Kebijakan Keuangan Kalurahan
 - 1. Kebijakan Pendapatan Kalurahan
 - 2. Kebijakan Belanja Kalurahan
 - 3. Kebijakan Pembiayaan Kalurahan

BAB III. EVALUASI KEGIATAN PEMBANGUNAN

- a. Evaluasi Pelaksanaan Program RKP Kalurahan tahun lalu
- b. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Kalurahan dan Prioritas Pembangunan

BAB IV. PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN KALURAHAN TAHUN 2027

BAB V. PENUTUP

- (2) RKP Kalurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) beserta matriknya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

BAB III

PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan
Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Kedungpoh.

Ditetapkan di Kedungpoh
pada tanggal : 30 September 2026

LURAH,

TTD

DWIYONO

Diundangkan di Kedungpoh
pada tanggal : 30 September 2026

CARIK,



RUSLAN MUDZAKIR

LAMPIRAN
PERATURAN KALURAHAN
KEDUNGPOH
NOMOR 3. TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH
KALURAHAN KEDUNGPOH
TAHUN 2027

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Kalurahan wajib menyusun perencanaan pembangunan Kalurahan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan merupakan penjabaran dari RPJM Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra kalurahan dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Rancangan RKP Kalurahan disusun oleh Pemerintah Kalurahan, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Kalurahan, Bamuskal dan masyarakat dalam Musrenbang Kalurahan, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan. Peraturan Kalurahan ditetapkan oleh Lurah selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Kalurahan oleh Carik.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Kalurahan, RKP Kalurahan merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan dengan melibatkan seluruh masyarakat Kalurahan dengan semangat gotong-royong. RKP Kalurahan merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau

acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan kalurahan selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Kalurahan tahun anggaran bersangkutan.

B. Dasar Hukum

RKP Kalurahan Kedungpoh Tahun 2027 disusun dengan berlandaskan kepada :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
8. Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Mekanisme Persetujuan Dari Kepala Desa Dalam Rangka Pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 593);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pedoman Sistem Informasi Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1015);
10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 15 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026 Nomor 15);
11. Peraturan Kalurahan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Daftar Kewenangan Kalurahan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan (Lembaran Kalurahan Kedungpoh Tahun 2025 Nomor 8);
12. Peraturan Kalurahan Kedungpoh Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Kedungpoh Tahun 2020-2025 (Lembaran Kalurahan Kedungpoh Tahun 2020 nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan perkal nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan Peraturan Kalurahan Kedungpoh Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Kedungpoh Tahun 2020-2025 (Lembaran Kalurahan Kedungpoh Tahun 2026 Nomor 2);

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RKP Kalurahan Kedungpoh Tahun 2027 adalah sebagai berikut :

1. Menyajikan dokumen perencanaan pembangunan tahunan Kalurahan yang menjamin adanya sinergi perumusan kondisi atau masalah Kalurahan, perencanaan, serta perumusan strategi yang sesuai dengan kebutuhan Kalurahan.

2. Menyajikan pedoman perencanaan pembangunan kalurahan bagi penyelenggaraan pemerintahan di Kalurahan Kedungpoh tahun 2027.

Tujuan dari penyusunan RKP Kalurahan Kedungpoh Tahun 2027 adalah sebagai berikut :

1. Mengevaluasi kinerja pembangunan Kalurahan Kedungpoh tahun 2025 ($n+1$), dan tahun 2026 (n), serta menganalisis prospek pembangunan tahun 2027 (*tahun $n-1$*) dengan memperhatikan kondisi pembangunan nasional dan regional;
2. Mengarahkan pencapaian Visi dan Misi Kalurahan Kedungpoh Tahun 2020 - 2027 ke dalam suatu strategi pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2027;
3. Memberikan penjelasan tentang kebijakan pembangunan Kalurahan Kedungpoh yang dituangkan dalam susunan prioritas program kegiatan Kalurahan tahun 2027;

D. Visi dan Misi Kalurahan

1. Visi Kalurahan Kedungpoh

Sesuai dengan kaidah perundang-undangan bahwa RKP Kalurahan harus selaras dengan RPJM Kalurahan, maka RKP Kalurahan Kedungpoh Tahun 2027 disusun dengan memperhatikan Visi dan Misi Kalurahan Kedungpoh yang tertuang dalam RPJM Kalurahan Kedungpoh Tahun 2020-2027, sebagai dasar dalam pelaksanaan pembangunan Kalurahan Kedungpoh, yaitu : “Menjadi Kedungpoh Lebih Baik, Cerdas, Mandiri, Berbudaya, dan Berakhlak Mulia”.

2. Misi Kalurahan Kedungpoh

Misi pembangunan Kalurahan adalah sesuatu yang diemban atau dilaksanakan oleh pemerintah Kalurahan, untuk mencapai visi pembangunan Kalurahan yang telah ditetapkan, agar tujuan pembangunan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Dalam rangka memberikan kemudahan bagi penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan Kalurahan, sesuai dan selaras dengan isi substansinya, maka dirumuskan misi pembangunan Kalurahan Tahun 2020-2027 sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang jujur dan berakhlak mulia;

2. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kelurahan;
3. Meningkatkan Perekonomian Kelurahan Melalui Pengembangan Potensi Lokal;
4. Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Sarana Prasarana Umum;
5. Meningkatkan Ketahanan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana Alam, dan Penyakit Menular;

BAB II

GAMBARAN UMUM DAN KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN

A. GAMBARAN UMUM DAN POTENSI WILAYAH

1. Gambaran Umum

Kalurahan Kedungpoh merupakan salah satu Kalurahan di Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, memiliki luas 1.079,983 hektar. Secara geografis Kalurahan Kedungpoh berbatasan dengan wilayah :

1. Sebelah Utara, berbatasan dengan Kalurahan Mertelu, Kapanewon Gedangsari;
2. Sebelah Timur, berbatasan dengan Kalurahan Bejiharjo, Karangmojo;
3. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Kalurahan Nglipar;
4. Sebelah Barat, Berbatasan dengan Kalurahan Pengkol.

Secara Administratif, wilayah Kalurahan Kedungpoh terdiri dari 10 padukuhan, 10 Rukun Warga, dan 48 Rukun Tetangga. Tipologi Kalurahan Kedungpoh terdiri dari lahan persawahan, perladangan, perkebunan, peternakan, Kerajinan dan industri kecil, Industri sedang, Jasa dan perdagangan). Topografis Kalurahan Kedungpoh secara umum termasuk daerah perbukitan dan berdasarkan ketinggian wilayah, yaitu : 208 m dpl, Kalurahan Kedungpoh diklasifikasikan kepada dataran sedang (>100 – 500 m dpl).

2. Sumber Daya Alam

Penggunaan lahan Kalurahan Kedungpoh dapat dilihat pada tabel II.1 sebagai berikut :

Tabel II.1
Penggunaan Lahan Kalurahan Kedungpoh

No.	Penggunaan Lahan	Tahun (Ha)
Lahan Sawah		
1.	Irigasi Teknis	64,22
2.	Tadah Hujan	66,34
Lahan Bukan Sawah		
1.	Pekarangan/Bangunan	278,92
2.	Tegal/Kebun	377,70

No.	Penggunaan Lahan	Tahun (Ha)
6.	Ditanami Pohon/Hutan Rakyat	214

Potensi Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Kalurahan Kedungpoh dapat dilihat pada tabel II.2 sebagai berikut :

Tabel II.2

Potensi Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan

No.	Komoditas	Produksi Per Tahun
		Satuan
1.	Tanaman Pangan	Ton/Tahun
	Padi	10
	Jagung	10
	Ubi Kayu	12
	Ubi Jalar	5
	Bawang Merah	150
	Cabai	5
	Kacang tanah	10
	Kedelai	5
2.	Buah-buahan	Ton/Tahun
	Alfukat	5
	Rambutan	5
	Mangga	10
	Pepaya	10
	Pisang	60
	Nangka	10
	Melon	10
	Semangka	5
	Anggur	0,5
	Jambu Air	4
	Jambu Biji	2
	Klengkeng	1
	Durian	1
	Duwet/Jamblang	1
	Kedondong	0,5

	Belimbing	0,5
	Sawo	1
	Kweni	0,5
3.	Perkebunan	Ton/Tahun
	Kelapa	10
	Kakau	2
	Kopi	0,5
	Cengkeh	0,1
	Merica	0,1
4.	Peternakan	Ekor
	Sapi	550
	Kambing	3.000
	Ayam kampung	10.000
	Ayam broiler	15.000
	Ayam Petelur	1.000
	Menthok	500
	Burung	100
5.	Perikanan	Ton/Tahun
	Lele	1
	Gurameh	1
	Nila	1
	Wader Pari	0,5
6.	Hasil Hutan	
	Madu lebah	1 ton
	Jahe	10 ton
	Sereh	5 ton
	Kunyit	5 ton
	Laos	5 ton
	Kencur	5 ton
	Akasia	3.000 m ³
	Jati	1.000 m ³
	Mahoni	2.000 m ³
	Sengon laut	1.000 m ³
	Sono Keling	500 m ³
	Bambu	20.000 btg
	Kayu bakar	10.000 m ³

	Arang	10 ton
--	-------	--------

Dari kondisi alam Kalurahan Kedungpoh di atas, dapat diidentifikasi Sumber Daya Alam yang dimiliki dan merupakan salah satu potensi pembangunan Kalurahan. Hasil Indentifikasi Sumber Daya Alam Kalurahan Kedungpoh Kapanewon Nglipar dapat dilihat pada tabel II.3 sebagai berikut :

Tabel II.3
Sumber Daya Alam Kalurahan Kedungpoh

No.	Uraian Sumber Daya Alam	Satuan	Jumlah
1.	Material Batu Kali dan Kerikil	M ³	-
2.	Pasir Urug	M ³	-
3.	Lahan Tegalan	Ha	377,70
4.	Lahan Hutan	Ha	125
5.	Hutan Kemasyarakatan	Ha	100
6.	Sungai	Km	40

3. Sumber Daya Manusia

Jumlah Penduduk Kalurahan Kedungpoh berdasarkan data Agregat Kependudukan semester II tahun 2025 sebanyak 6.337 jiwa yang terdiri dari 3.132 laki-laki dan 3.205 perempuan. Sumber penghasilan utama penduduk adalah dari sektor pertanian dan perdagangan. Data Sumber Daya Manusia Kalurahan Kedungpoh, Kapanewon Nglipar dapat dilihat pada tabel II.4 sebagai berikut :

Tabel II.4
Daftar Sumber Daya Manusia Kalurahan Kedungpoh

No.	Uraian Sumber Daya Manusia	Satuan	Jumlah
1.	Penduduk dan Keluarga		
	a. Penduduk Laki-laki	Orang	3.132
	b. Penduduk Perempuan	Orang	3.205
	c. Jumlah Keluarga	Keluarga	2.211

No.	Uraian Sumber Daya Manusia	Satuan	Jumlah
2.	Sumber Penghasilan Utama Penduduk		
	a. Pertanian, Perikanan, Perkebunan	Orang	1.288
	b. Pertambangan dan Penggalian	Orang	-
	c. Industri Pengolahan (Pabrik, Kerajinan dll.)	Orang	313
	d. Perdagangan Besar/Eceran dan Rumah Makan	Orang	1.204
	e. Angkutan, Pergudangan, Komunikasi	Orang	
	f. Jasa	Orang	29
3.	Pekerjaan/Mata Pencaharian		
	a. Petani/ Buruh Tani	Orang	974
	b. Wiraswasta	Orang	1.053
	c. Buruh Harian Lepas	Orang	290
	d. Karyawan Swasta	Orang	439
	e. PNS	Orang	49
	f. Pensiunan	Orang	41
	g. Mengurus Rumah Tangga	Orang	1.096
	h. Perangkat Desa	Orang	12
	i. Tidak Bekerja	Orang	1.328
	j. Lainnya	Orang	1.055
4.	Tingkat Pendidikan Masyarakat		
	a. Lulusan pendidikan Umum		
	1) Tidak Sekolah/Belum Sekolah	Orang	1.536
	2) Tidak Tamat Sekolah Dasar	Orang	536
	3) Tamat Sekolah Dasar	Orang	1.331
	4) Tamat SLTP	Orang	1.212
	5) Tamat SLTA	Orang	1.494
	6) D1-D2	Orang	20
	7) D3	Orang	35
	8) S1	Orang	164

No.	Uraian Sumber Daya Manusia	Satuan	Jumlah
	9) S2	Orang	7
	10) S3	Orang	2
	b. Lulusan pendidikan khusus		
	1) Pondok Pesantren	Orang	
	2) Pendidikan Keagamaan	Orang	
	3) Sekolah Luar Biasa	Orang	
	4) Kursus Keterampilan	Orang	
	c. Tidak lulus dan tidak sekolah		
	1) Tidak lulus	Orang	
	2) Tidak bersekolah	Orang	1.536
5.	Jumlah Penduduk Miskin (2026) (menurut DTSEN 2026)	Orang	4.737

4. Sumber Daya Pembangunan

Sumber Daya Pembangunan yang dimiliki Kalurahan Kedungpoh yang merupakan salah satu potensi untuk pembangunan Kalurahan diantaranya dapat dilihat pada tabel II.5.

Tabel II.5

Sumber Daya Pembangunan Kalurahan Kedungpoh

No.	Uraian Sumber Daya Alam	Jumlah	Satuan
1.	Kantor Kalurahan	1	Paket
2.	Prasarana Umum		
	a. Jalan Propinsi	3,5	Km
	b. Jalan Kabupaten	9	Km
	c. Jalan Kalurahan	52	Km
	d. Jembatan	53	Buah
3.	Prasarana Pendidikan		
	a. Perpustakaan Kalurahan	1	Buah
	b. Gedung Sekolah PAUD	9	Buah
	c. Gedung Sekolah TK	7	Buah
	d. Taman Pendidikan Al Qur'an	20	Buah
	e. Gedung SD/Sederajat	5	Buah
	f. Gedung Sekolah SMP/Sederajat	3	Buah

No.	Uraian Sumber Daya Alam	Jumlah	Satuan
	g. Gedung Sekolah SMA/Sederajat	1	Buah
	h. Gedung Perguruan Tinggi	-	Buah
4.	Prasarana Kesehatan		
	a. Puskesmas	Ada	
	b. Poskesdes	-	Buah
	c. Posyandu	10	Buah
	d. Posbindu	1	Buah
	e. Polindes	-	Buah
	f. MCK umum	51	Buah
	g. Sarana Air Bersih	10	Buah
5.	Prasarana Ekonomi		
	a. Pasar Kalurahan	2	Buah
	b. Kios Kalurahan	4	Buah
6.	Prasarana Ibadah		
	a. Mesjid	20	Buah
	b. Mushola	16	Buah
	c. Gereja	-	Buah
	d. Pura	-	Buah
	e. Vihara	-	Buah
	f. Klenteng	-	Buah
7.	Prasarana Umum		
	a. Olahraga	12	Buah
	b. Kesenian/budaya (gamelan)	5	Paket
	c. Balai pertemuan	11	Buah
	d. Sumur Kalurahan	1	Buah
	e. Pasar Kalurahan	2	Buah

5. Sumber Daya Sosial Budaya

Sumber Daya Sosial Budaya yang dimiliki Kalurahan Kedungpoh yang merupakan salah satu potensi untuk pembangunan Kalurahan diantaranya dapat dilihat pada tabel II.6.

Tabel II.6

Daftar Sumber Daya Sosial Budaya

No.	Uraian Sumber Daya Sosial Budaya	Satuan	Jumlah
1.	Kelembagaan		
	a. LPMD		
	1) Jumlah pengurus	Orang	21
	2) Jumlah anggota	Orang	30
	b. Lembaga Adat	Lembaga	
	c. TP PKK		
	1) Jumlah pengurus	Orang	40
	2) Jumlah anggota	Orang	1.970
	a. BUMDes		
	1) Jumlah Bumdes	Lembaga	1
	2) Jenis Bumdes	Unit	3
	b. Karang Taruna		
	1) Jenis Kegiatan	Buah	2
	2) Jumlah Pengurus	Orang	11
	3) Jumlah Anggota	Orang	1.000
	c. RT/RW		
	1) Jumlah RW	Buah	10
	2) Jumlah RT	Buah	48
	d. Lembaga Kemasyarakatan lainnya	Buah	4
2.	Trantib Dan Bencana		
	a. Jumlah Anggota Linmas	Orang	46
	b. Jumlah Pos Kamling	Buah	48
	c. Jumlah Operasi Penertiban	Kali	-
	d. Jumlah Kejadian Kriminal		-
	1. Pencurian	Kali	-
	2. Perkosaan	Kali	-
	3. Kenakalan Remaja	Kali	-
	4. Pembunuhan	Kali	-
	5. Perampokan	Kali	-
	6. Penipuan	Kali	-
	e. Jumlah Kejadian Bencana	Kali	0

	f. Jumlah Pos Bencana Alam	Pos	1
	g. Jumlah Pembalakan Liar	Kali	-
	h. Jumlah Pos Hutan Lindung	Pos	-
3.	Seni Budaya		
	a. Jumlah Group Kesenian	Buah	37
	b. Jumlah Gedung Kesenian	Buah	2
	c. Jumlah Gelar Seni Budaya per Tahun	Kali	2

B. KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN

Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kalurahan.

Pengelolaan Keuangan Kalurahan merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan Kalurahan. Agar pengelolaan keuangan Kalurahan lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan Kalurahan sesuai amanah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pelaksanaannya, Pedoman Pengelolaan Keuangan Kalurahan, dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, maka setiap tahunnya Pemerintah Kalurahan bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan menetapkan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan secara partisipatif dan transparan yang proses penyusunannya dimulai dengan Musyawarah Kalurahan, konsultasi publik dan Musyawarah Bamuskal untuk penetapannya. RAPB Kalurahan didalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Kalurahan dalam penyusunan APB Kalurahan Tahun Anggaran 2027 terkait dengan

Pendapatan Kalurahan, Belanja Kalurahan, dan Pembiayaan Kalurahan adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Pendapatan Kalurahan

Pendapatan Kalurahan adalah semua penerimaan Kalurahan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Kalurahan dan tidak perlu dikembalikan oleh Kalurahan. Lurah sesuai kewenangannya wajib mengintensifkan pendapatan asli kalurahan. Pendapatan Kalurahan yang dianggarkan dalam APB Kalurahan Tahun Anggaran 2027 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Struktur pendapatan kalurahan diklasifikasi menurut kelompok, jenis, dan obyek pendapatan, yang meliputi:

1. Pendapatan Asli Kalurahan

Pendapatan Asli Kalurahan adalah penerimaan Kalurahan yang diperoleh atas usaha sendiri sebagai pelaksanaan kewenangan kalurahan, meliputi:

a) Hasil usaha

Untuk menetapkan penganggaran Pendapatan Asli Kalurahan yang bersumber dari bagian hasil usaha yang dikelola BUMKal dan BUMKalma berdasarkan pada Peraturan Kalurahan tentang Pembentukan BUMKal dan Peraturan Lurah Bersama tentang Pembentukan BUMKalma.

b) Hasil pengelolaan aset/kekayaan

Untuk menetapkan penganggaran pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan aset/kekayaan Kalurahan yang berpotensi menyumbangkan Pendapatan Kalurahan (pemanfaatan aset milik Kalurahan yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintahan Kalurahan) antara lain:

- 1) tanah milik Kalurahan;
- 2) pasar Kalurahan;
- 3) pemanfaatan lapangan/prasarana olahraga milik Kalurahan;
- 4) kios Kalurahan;
- 5) objek rekreasi yang dikelola Kalurahan;
- 6) balai Kalurahan;
- 7) gedung/bangunan milik Kalurahan;

- 8) gedung pertemuan/gedung serbaguna milik Kalurahan;
- 9) balai/panggung seni budaya milik Kalurahan; dan
- 10) hasil aset lain sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Kalurahan.

Penganggaran hasil pengelolaan aset/kekayaan Kalurahan yang tidak dipisahkan memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai aset/kekayaan Kalurahan yang tidak dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu. Pengelolaan aset/kekayaan Kalurahan mendasarkan pada Peraturan Kalurahan tentang Pengelolaan Aset/Kekayaan Milik Kalurahan dan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Milik Desa.

c) Hasil Swadaya, partisipasi, dan gotong royong

Penganggaran swadaya dan partisipasi masyarakat perlu dilakukan jika Pemerintah Kalurahan bersama Bamuskal pada tahun sebelumnya telah melaksanakan musyawarah dan dituangkan dalam kesepakatan dengan masyarakat bahwa masyarakat pada tahun anggaran berjalan akan melaksanakan swadaya dan berpartisipasi dalam bentuk uang untuk mendukung pelaksanaan suatu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan. Kesepakatan mengenai swadaya dan partisipasi masyarakat dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani unsur Pemerintah Kalurahan, unsur Bamuskal, dan perwakilan masyarakat.

d) Lain-lain Pendapatan Asli Kalurahan

Lain-lain Pendapatan Asli Kalurahan terdiri dari:

- 1) hasil pungutan kalurahan sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Kalurahan yang ditetapkan dalam Peraturan Kalurahan;
- 2) penjualan hasil hutan milik Kalurahan;
- 3) hasil penjualan/penghapusan aset/barang milik Kalurahan;
- 4) tuntutan ganti kerugian Kalurahan;

- 5) pengembalian atas temuan hasil pemeriksaan pengelolaan keuangan Kalurahan;
- 6) pendapatan denda sewa menyewa aset desa;
- 7) pendapatan atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan;
- 8) hasil pengelolaan tanah kas Kalurahan;
- 9) hasil pelepasan tanah Kalurahan; dan
- 10) pendapatan denda sewa-menyewa aset Kalurahan.

Pendapatan Asli Kalurahan sebagaimana tersebut pada huruf a), b), dan d) di atas, kode sumber dananya menggunakan kode PAD. Sedangkan untuk pendapatan pada huruf c) menggunakan kode SWD.

Pendapatan Asli Kalurahan dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan pada semua bidang Belanja Kalurahan sesuai dengan RKP Kalurahan Tahun 2027.

Pengelolaan dan Pelepasan tanah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada huruf d) angka 8) dan angka 9) yang asal usulnya tanah hak anggaduh dilaksanakan berdasarkan pada Peraturan Gubernur DIY Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan. Penganggaran pendapatan yang bersumber dari ganti rugi/untung atas pelepasan aset milik kalurahan adalah sebagai berikut:

- 1) Bagi Kalurahan yang menerima ganti rugi/untung atas pelepasan aset seperti bangunan/gedung milik Kalurahan, dimasukkan dalam Pendapatan dari penjualan penghapusan barang/aset milik Kalurahan dengan kode pendapatannya adalah DLL.
- 2) Bagi Kalurahan yang menerima ganti rugi/untung atas pelepasan tanah Kalurahan, dianggarkan pada hasil pelepasan tanah Kalurahan dengan kode pendapatannya adalah DLL.

2. Pendapatan Transfer

a) Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Kaluraha yang ditransfer dari Rekening Kas Umum Negara ke

Rekening Kas Klaurahan. Dana Desa dianggarkan sesuai besaran yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang besarnya pagu alokasi Dana Desa tahun anggaran 2026. Dalam hal belum ada penetapan alokasi Dana Desa kepada Pemerintah Kalurahan tahun anggaran 2026, maka penganggaran Dana Desa didasarkan pada pagu tahun anggaran sebelumnya.

Apabila Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang pagu alokasi Dana Desa ditetapkan/diterima setelah Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan ditetapkan, Pemerintah Kalurahan harus menyesuaikan pagu Dana Desa dimaksud melalui perubahan Peraturan Lurah tentang penjabaran APB Kalurahan sebelum rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan ditetapkan. Kode sumber dana yang dipergunakan adalah DDS.

b) **Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**

Alokasi untuk bagian hasil pajak dan retribusi Daerah minimal 10,00% (sepuluh perseratus) dari realisasi pendapatan pajak Daerah dan retribusi Daerah pada tahun anggaran berjalan yang dibagi secara proporsional kepada seluruh Kalurahan. Disamping itu, dapat untuk menganggarkan kekurangan bagian hasil pajak dan retribusi Daerah tahun sebelumnya jika ada selisih lebih antara target dan realisasi penerimaan.

Penganggaran dana transfer dari bagian hasil pajak dan retribusi Daerah sesuai dengan Keputusan Bupati tentang besaran alokasi bagian hasil pajak dan retribusi Daerah bagi Kalurahan tiap tahun anggaran yang masuk dalam APB Kalurahan. Apabila Keputusan Bupati tentang alokasi bagian hasil pajak dan retribusi daerah bagi kalurahan tahun anggaran 2027 belum ditetapkan, maka penganggaran bagian hasil pajak dan retribusi daerah didasarkan pada informasi pagu indikatif tahun anggaran 2026 yang disampaikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pemerintahan kalurahan. Apabila Keputusan Bupati belum ditetapkan dan Perangkat Daerah yang membidangi pemerintahan kalurahan belum memberikan informasi tentang

pagu besaran bagian hasil pajak dan retribusi daerah, maka penganggaran bagian hasil pajak dan retribusi daerah didasarkan pada besaran bagian hasil pajak dan retribusi daerah tahun 2025. Selain alokasi bagian hasil retribusi daerah untuk seluruh Kalurahan, juga untuk menganggarkan alokasi bagian hasil retribusi daerah yang dialokasikan kepada Kalurahan tertentu karena mendapat penugasan dari Pemerintah Daerah untuk membantu memungut retribusi tempat rekreasi dan olahraga. Dana dari bagian hasil pajak dan retribusi Daerah dapat dipergunakan untuk mendukung semua bidang Belanja Kalurahan. Kode sumber dana yang dipergunakan adalah PBH.

c) Alokasi Dana Desa (ADD)

Besaran total ADD paling sedikit 10,00% (sepuluh perseratus) dari Dana Perimbangan yang diperoleh oleh Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Penggunaan ADD untuk membiayai pelaksanaan kegiatan semua bidang Belanja Kalurahan sesuai dengan RKP Kalurahan Tahun 2027.

Penganggaran pendapatan transfer Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai dengan Keputusan Bupati tentang besaran Alokasi Dana Desa (ADD) pada tahun anggaran APB Kalurahan. Apabila Keputusan Bupati tentang Alokasi Dana Desa (ADD) bagi kalurahan tahun anggaran 2027 belum ditetapkan, maka penganggaran Alokasi Dana Desa (ADD) didasarkan pada informasi pagu indikatif tahun anggaran 2026 yang disampaikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pemerintahan kalurahan. Apabila Keputusan Bupati belum ditetapkan dan Perangkat Daerah yang membidangi pemerintahan kalurahan belum memberikan informasi tentang pagu besaran Alokasi Dana Desa (ADD), maka penganggaran Alokasi Dana Desa (ADD) didasarkan pada besaran Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2026. Kode sumber dana yang dipergunakan adalah ADD.

d) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi DIY

Bantuan Keuangan dari APBD Pemerintah Daerah DIY untuk menganggarkan jika ada alokasi Bantuan Keuangan dari APBD Pemerintah Daerah DIY yang bersifat umum dan/atau khusus.

Penganggaran BKK Provinsi sesuai dengan Keputusan Gubernur tentang besaran BKK Provinsi.

Apabila Keputusan Gubernur tentang besaran BKK Provinsi belum ditetapkan, maka penganggarannya didasarkan pada informasi yang disampaikan oleh Perangkat Daerah yang mengurus bantuan keuangan khusus kalurahan. Apabila Keputusan Gubernur belum ditetapkan dan Perangkat Daerah yang mengurus bantuan keuangan khusus kalurahan belum memberikan informasi tentang besaran BKK Provinsi, maka penganggaran bantuan keuangan APBD Provinsi didasarkan pada besaran dalam proposal yang disampaikan oleh pemerintah kalurahan.

Apabila Keputusan Gubernur mengatur tentang pagu BKK Provinsi ditetapkan/diterima setelah Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan ditetapkan, Pemerintah Kalurahan harus menyesuaikan pagu BKK Provinsi dimaksud melalui perubahan Peraturan Lurah tentang penjabaran APB Kalurahan sebelum rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan ditetapkan. BKK Provinsi dipergunakan untuk membiayai kegiatan sesuai dengan penggunaan yang telah ditetapkan. Apabila permohonan BKK Provinsi tidak disetujui, maka kegiatan yang didanai dari sumber tersebut tidak boleh dilaksanakan. Kode sumber dana yang dipergunakan adalah PBP.

e) Bantuan keuangan dari APBD Kabupaten

Bantuan keuangan dari APBD untuk menganggarkan jika ada alokasi Bantuan keuangan dari APBD Kabupaten Gunungkidul yang bersifat umum dan/atau bersifat khusus.

Penganggaran BKK Kabupaten sesuai dengan Keputusan Bupati tentang besaran BKK Kabupaten.

Apabila Keputusan Bupati tentang besaran BKK Kabupaten belum ditetapkan, maka penganggarannya didasarkan pada informasi yang disampaikan oleh Perangkat Daerah yang mengurus bantuan keuangan khusus kalurahan. Apabila Keputusan Gubernur belum ditetapkan dan Perangkat Daerah yang mengurus bantuan khusus keuangan kalurahan belum memberikan informasi tentang besaran BKK Kabupaten, maka

penganggaran bantuan keuangan APBD Kabupaten didasarkan pada besaran dalam proposal yang disampaikan oleh pemerintah kalurahan.

Apabila Keputusan Bupati yang mengatur tentang pagu BKK Kabupaten ditetapkan/diterima setelah Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan ditetapkan, Pemerintah Kalurahan harus menyesuaikan pagu BKK Kabupaten dimaksud melalui perubahan Peraturan Lurah tentang penjabaran APB Kalurahan sebelum rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan ditetapkan. BKK Kabupaten dipergunakan untuk membiayai kegiatan sesuai dengan penggunaan yang telah ditetapkan. Apabila permohonan BKK Kabupaten tidak disetujui, maka kegiatan yang didanai yang berasal dari sumber tersebut tidak boleh dilaksanakan. Kode sumber dana yang dipergunakan adalah PBK.

3. Pendapatan Lain-lain

Penganggaran Pendapatan Lain-lain meliputi:

- a) penerimaan dari hasil kerja sama dengan pihak ketiga;
- b) penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Kalurahan;
- c) hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
- d) koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Kalurahan pada tahun anggaran berjalan;
- e) bunga bank;
- f) Insentif/hadiah kalurahan lunas PBB;
- g) hadiah perlombaan; dan
- h) lain-lain pendapatan Kalurahan yang sah.

Kode sumber dana yang dipergunakan pada aplikasi SISKEUDES adalah DLL.

Tabel II.7
PENDAPATAN KALURAHAN KEDUNGPOH
REALISASI 2025 DAN PROYEKSI TAHUN 2026 & 2027

No	Indikatif Program/ Kegiatan Desa	Tahun			Ket.
		Realisasi (n+1/2025	Berjalan (n/2026)	Proyeksi (n-1/2027)	
I	2	3	4		
I	Pendapatan Asli Desa (PADes)				
A	Hasil Usaha Desa;	9.535.000	7.243.000	7.243.000	
B	Hasil Pengelolaan Aset Desa;	10.710.000	10.625.000	10.625.000	
C	Swadaya, Partisipasi, dan gotong-royong;				
D	Lain-lain Pendapatan Asli Desa	10.724.000	27.774.000,	27.774.000,	
II	Kelompok Dana Transfer				
A	Dana Desa (APBN)	1.211.365.000	373.456.000	373.456.000	
B	Alokasi Dana Desa	858.423.900	864.708.500	864.708.500	
C	Dana bagian dari hasil pajak dan retribusi	130.488.900	117.098.300	117.098.300	
D	Bantuan Keuangan				
	1. APBD Provinsi	592.359.000	445.000.000	445.000.000	
	2. APBD Kabupaten	181.600.000			
III	Pendapatan Lain- lain				
	1. Hibah				
	2. Sumbangan Pihak ke tiga	16.000.000	16.000.000	16.000.000	

	3. Bunga Bank	5.362.712	4.000.000	4.000.000	
	Total Pendapatan	3.026.568.512	1.865.904.800	1.865.904.800	

2. Kebijakan Belanja Kalurahan

Belanja Kalurahan adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban kalurahan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Kalurahan. Belanja Kalurahan digunakan untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam rangka mendukung visi dan misi pemerintah kalurahan. Penganggaran belanja kalurahan dilakukan dengan pendekatan penganggaran berbasis kinerja dimana pendekatan dalam penyusunan anggaran didasarkan pada kinerja atau prestasi kerja yang ingin dicapai. Belanja kalurahan disusun memperhatikan hal-hal sebagai berikut;

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 121 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, komposisi Belanja Kalurahan yang ditetapkan dalam APB Kalurahan dipergunakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) paling sedikit 70,00% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran Belanja Kalurahan digunakan untuk mendanai:
 - 1) penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;
 - 2) pelaksanaan pembangunan Kalurahan;
 - 3) pembinaan kemasyarakatan Kalurahan;
 - 4) pemberdayaan masyarakat Kalurahan; dan
 - b) paling banyak 30,00% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran Belanja Kalurahan mendanai pada bidang penyelenggaraan pemerintahan kalurahan untuk:
 - a. penghasilan tetap, tunjangan, Tunjangan Purnatugas, dan jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan Kepala Desa, sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya; dan
 - b. tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi, tunjangan lain, Tunjangan Purnatugas, jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan pimpinan dan anggota serta operasional BPD.

Belanja kalurahan merupakan Sinkronisasi Prioritas dan Kebijakan Pembangunan Nasional dan Daerah dengan prioritas program pembangunan di kalurahan pada tahun 2027 dengan memperhatikan kewenangan, kondisi dan potensi kalurahan. Adapun kegiatan-kegiatan wajib dan kegiatan prioritas di Kalurahan untuk tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Wajib

A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

- (1) Penghasilan tetap Lurah, Pamong, dan Staf Pamong Kalurahan.
- (2) Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Kalurahan (BAMUSKAL).
- (3) Biaya iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Lurah, Pamong Kalurahan, dan Staf Pamong Kalurahan (6,24 % setiap bulan dari besaran penghasilan tetap per bulan).
- (4) Biaya iuran Jaminan Kesehatan Staf Pamong Kalurahan (4 % setiap bulan dari besaran penghasilan tetap per bulan).
- (5) Operasional/ Insentif RT dan RW.
- (6) Biaya iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Bamuskal, Ketua RW dan Ketua RT.
- (7) Pendataan keluarga/ rumah tangga miskin (pemutakhiran data kemiskinan/ Basis Data Terpadu) serta penyelenggaraan muskal penetapan DTSEN;
- (8) Penyelenggaraan Musyawarah Kalurahan untuk penyusunan RKP Kalurahan dan/ atau RPJM Kalurahan;
- (9) Penyelenggaraan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kalurahan untuk penyusunan RKP Kalurahan dan/ atau RPJM Kalurahan.
- (10) Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilur, Penyaringan dan Penjaringan Pamong Kalurahan, dan Pemilihan Bamuskal (bagi Kalurahan yang masa jabatan Lurahnya habis pada tahun 2027)

(11) Biaya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tanah kas kalurahan yang dikelola oleh pemerintah Kalurahan.

B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.

(1) Operasional Forum Desa Siaga/ Kalurahan Sehat dan operasional Rumah Desa Sehat (RDS), dengan fokus kegiatan pada pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis (TBC);

(2) Honor pendidik PAUD yang tidak mendapatkan alokasi dari APBD maupun APBN;

(3) Insentif kader kesehatan dan/ atau kader KB yang tidak mendapatkan alokasi dari APBD maupun APBN;

(4) Insentif kader Posyandu;

(5) Penyelenggaraan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS).

(Fokus pada kegiatan penyeenggaraan Desa Siaga Tuberkulosis yang mendukung program Eliminasi AIDS, Tuberkulosis dan Malaria (ATM)).

C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa.

(1) Optimalisasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kalurahan (TKPK Kalurahan), dengan fokus kegiatan pencapaian target kinerja reformasi kalurahan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah DIY;

(2) Insentif Kader Pembangunan Manusia yang tidak mendapatkan alokasi dari APBD maupun APBN dianggarkan dalam kegiatan Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat;

D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Kegiatan ketahanan pangan dalam rangka mendukung penurunan stunting dan penurunan kemiskinan di kalurahan;

2. Kegiatan Prioritas Kalurahan

Adapun kegiatan-kegiatan yang perlu diprioritaskan oleh Kalurahan antara lain;

(1) penyusunan Profil Kalurahan;

(2) penyusunan Monografi Kalurahan;

- (3) optimalisasi Sistem Informasi Kalurahan (SIDA SAMEKTA);
- (4) Pemilihan Lurah bagi Kalurahan yang habis masa jabatannya pada tahun 2027.
- (5) updating Data Kemiskinan, Sosial dan Ekonomi serta Pemutakhiran IDM dan Pemutakhiran SDGs Desa;
- (6) biaya perlombaan/ evaluasi perkembangan kalurahan bagi kalurahan yang akan mengikuti perlombaan/ evaluasi kalurahan dianggarkan dalam kegiatan Pelaksanaan lomba/ evaluasi perkembangan kalurahan;
- (7) pemberian stimulan jamban sehat dan/ atau stimulan bedah rumah/ RTLH dengan penerima bantuan mendasarkan pada basis data kemiskinan yang ada dalam sistem informasi desa dan diutamakan untuk warga masyarakat kalurahan yang stunting/ rentan stunting, rentan sakit menahun/ kronis, AIDS, Tuberculosis, Malaria (ATM) dan penyakit menular lain;
- (8) kegiatan yang berkaitan dengan upaya penurunan stunting di Kalurahan sesuai hasil Musyawarah Kalurahan mengenai stunting. Fokus kegiatan diprioritaskan pada kegiatan penanganan stunting dan penguatan TPPS Kalurahan serta kegiatan dalam rangka intervensi spesifik, intervensi sensitif dan koordinatif sesuai dengan basis data sasaran stunting di kalurahan;
- (9) kegiatan untuk pengembangan dan fasilitasi Desa Siaga Kesehatan dengan fokus pada edukasi, pencegahan dan deteksi pada penyakit AIDS, Tuberculosis, Malaria (ATM) dan Penyakit menular lainnya;
- (10) kegiatan untuk mendukung program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) dan precursor narkoba;
- (11) Kegiatan-kegiatan untuk mendukung pencapaian 4 target indikator reformasi kalurahan;
- (12) pengelolaan sampah dan air limbah rumah tangga;
- (13) deklarasi sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) 5 pilar;
- (14) pengelolaan wisata kalurahan;

- (15) peningkatan kapasitas aparaturn kalurahan;
- (16) peningkatan kapasitas BUMKal;
- (17) pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat.
- (18) operasional dan optimalisasi peran klembagaan Kalurahan Tangguh Bencana (Kaltana) bagi kalurahan yang telah membentuk;
- (19) operasional PKK;
- (20) operasional Karang Taruna;
- (21) operasional LPMK;
- (22) operasional Posyandu; dan
- (23) operasional KIM.

Dalam rangka mendukung target dan sasaran nasional khususnya SDGs Desa (Sustainable Development Goals Desa)/ Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Desa, diperlukan sinergi dalam perencanaan pembangunan kalurahan sesuai prioritas dan kewenangan kalurahan. Kegiatan Wajib dan Kegiatan Prioritas sebagaimana tersebut di atas dan juga kegiatan lainnya yang ada di kalurahan wajib diarahkan dan disinkronkan dengan 17 sasaran SDGs Desa sesuai dengan kondisi dan prioritas yang ada di Kalurahan masing-masing.

Tabel II.8
 BELANJA KALURAHAN KEDUNGPOH
 REALISASI 2025 DAN PROYEKSI TAHUN 2026 & 2027

Kode Rekening	Uraian	Tahun			Ket.
		Realisasi (n+1/2025)	Berjalan (n/2026)	Proyeksi (n-1/2027)	
2.	Belanja Kalurahan				
2. 1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	1.110.183.226	1.121.990.717	1.121.990.717	

2. 2	Bidang Pembangunan Kalurahan	1.265.387.000	751.119.535	751.119.535	
2. 3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan	55.825.000	53.030.045	53.030.045	
2. 4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	227.761.000	69.473.000	69.473.000	
2. 5	Belanja Tak Terduga	64.790.000	28.300.060	28.300.060	
JUMLAH		2.723.946.226	2.023.913.357	2.023.913.357	

3. Kebijakan Pembiayaan Kalurahan

1. Penerimaan Pembiayaan

- a) Proyeksi SiLPA 2026 agar dimasukkan dalam APB Kalurahan Tahun Anggaran 2027. Penganggaran SiLPA didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2026 dari kegiatan yang telah terlaksana dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2027 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan;
- b) Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan, dan besarnya sesuai Peraturan Kalurahan tentang Pembentukan Dana Cadangan; dan
- c) Hasil penjualan kekayaan Kalurahan yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan, digunakan antara lain untuk menganggarkan:
 - 1) penjualan aset kalurahan yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga; dan
 - 2) hasil penjualan kekayaan BUMKal.

2. Pengeluaran Pembiayaan

- a) Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan pada BUMKal dan BUMKalma ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan tentang Penyertaan Modal. Penyertaan Modal dapat dilakukan apabila:
 - 1) BUMKal telah dibentuk dengan Peraturan Kalurahan;
 - 2) BUMKalma telah dibentuk dengan Peraturan Kalurahan Bersama;
 - 3) telah memiliki AD/ART;
 - 4) Pengelola BUMKal yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
 - 5) Pengelola BUMKalma yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bersama Lurah; dan
 - 6) telah memiliki program kerja dan jenis usaha yang dijalankan.

Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam Peraturan Kalurahan tentang Penyertaan Modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan Peraturan Kalurahan tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Kalurahan tentang Penyertaan Modal.

Dalam hal Pemerintah Kalurahan akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Kalurahan tentang Penyertaan Modal dimaksud, Pemerintah Kalurahan melakukan Perubahan Peraturan Kalurahan tentang Penyertaan Modal tersebut. Pemerintah Kalurahan dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada BUMKal/BUMKalma untuk memperkuat struktur permodalan, dalam rangka penyehatan dan/atau pengembangan BUMKal/BUMKalma.

- b) Untuk menganggarkan pembentukan dana cadangan, Pemerintah Kalurahan terlebih dahulu harus menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Pembentukan Dana Cadangan yang mengatur tujuan pembentukan dana cadangan, kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran, dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan.

Jumlah selisih pembiayaan yaitu selisih antara penerimaan pembiayaan dikurangi pengeluaran pembiayaan harus dapat menutup defisit anggaran.

Tabel II.9
 PEMBIAYAAN KALURAHAN KEDUNGPOH
 REALISASI TAHUN 2024 TAHUN 2025 & 2026

Kode Rekening	Uraian	Tahun			Ket.
		Realisasi (n+1/2025)	Berjalan (n/2026)	Proyeksi (n-1/2027)	
3.	Pembiayaan				
3. 1	Penerimaan Pembiayaan				
3. 1. 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya	97.659.271	158.008.557	50.000.000	
3. 1. 2	Hasil Penjualan kekayaan Kalurahan yang dipisahkan				
3. 2	Pengeluaran Pembiayaan				
3. 2. 1	Pembentukan dana Cadangan				
3. 2. 2	Penyertaan Modal Kalurahan	242.273.000			
JUMLAH		(144.613.729)	158.008.557	50.000.000	

BAB III

EVALUASI PROGRAM/ KEGIATAN PEMBANGUNAN

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat kalurahan, bukan semata-mata disebabkan oleh internal Kalurahan, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kapanewon, kabupaten, provinsi maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidacermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya inefisiensi anggaran.

Identifikasi dan Perumusan masalah pembangunan Kalurahan Kedungpoh dilakukan berdasarkan beberapa aspek, sebagai berikut :

A. Evaluasi Pelaksanaan Program RKP Kalurahan tahun 2025

Evaluasi pelaksanaan kegiatan merupakan tahapan krusial dalam siklus manajemen pembangunan di tingkat Kalurahan. Pemerintah Kalurahan Kedungpoh melakukan evaluasi secara berkala dan menyeluruh terhadap seluruh program serta kegiatan yang dialokasikan dalam APB Kalurahan Tahun Anggaran 2025.

Evaluasi ini dilaksanakan dengan dua tujuan utama:

1. Mengukur Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan Pembangunan: Mengetahui sejauh mana program dan kegiatan telah terealisasi, baik dari segi ketercapaian anggaran maupun kualitas fisik/output kualitatif di lapangan.
2. Bahan Penyusunan Rencana Pembangunan Berikutnya : Mengidentifikasi kendala yang dihadapi serta menjadikan hasil evaluasi sebagai bahan masukan utama dalam merumuskan RKP Kalurahan dan APB Kalurahan periode mendatang agar lebih tepat sasaran, efektif, efisien, dan akuntabel.

Pemerintah Kalurahan Kedungpoh menerapkan pendekatan evaluasi terpadu yang memadukan pencatatan data kuantitatif keuangan melalui aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dengan penelaahan kualitatif lapangan.

Ringkasan Pendapatan dan Pendanaan

Pada Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kalurahan Kedungpoh mencatatkan total pendapatan sebesar Rp 3.026.568.512,00 dari target anggaran sebesar Rp 3.020.859.400,00 (mencapai 100,19%).

Kinerja pendapatan disokong oleh:

- Pendapatan Asli Desa (PADes): Rp 30.969.000,00 (151,62% dari target Rp 20.425.000,00), didorong optimalisasi hasil aset kios desa, tanah kas desa, dan bagi hasil BUMKal/Bumkalma.
- Pendapatan Transfer: Rp 2.974.236.800,00 (Dana Desa Rp 1.211.365.000,00, Alokasi Dana Desa Rp 858.423.900,00, Bagi Hasil Pajak/Retribusi Rp 130.488.900,00, serta Bantuan Keuangan Provinsi/Kabupaten Rp 773.959.000,00).
- Pendapatan Lain-lain: Rp 21.362.712,00 (Hibah Pihak Ketiga dan Bunga Bank).

Secara umum, sebagian besar program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam APB Kalurahan Kedungpoh TA 2025 telah berhasil dilaksanakan dengan baik dan tuntas, meskipun terdapat beberapa sub-kegiatan skala kecil yang perlu penyesuaian:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Realisasi: Rp 1.110.183.226,00 /93,49%):
 - Penghasilan Tetap (Siltap) dan tunjangan Lurah, Pamong, serta BPD terbayar secara rutin dan tepat waktu.
 - Insentif RT/RW dan operasional lembaga kemasyarakatan tersalurkan lancar.
 - Pemeliharaan gedung kantor dan pengadaan komputer/peralatan kerja selesai dilaksanakan.
 - Musyawarah Kalurahan (Muskal/Musrenbangkal), penyusunan RKPDes, APBDes, dan Sistem Informasi Desa berjalan sesuai agenda.
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa (Realisasi: Rp 1.265.387.000,00 /96,98%):
 - Pembangunan fisik jalan cor blok dan talud/drainase pemukiman sebagian besar telah selesai tuntas.
 - Dukungan operasional PAUD/TK, insentif pendidik non-formal, serta penyuluhan pendidikan berjalan 100%.

- Posyandu rutin (balita, bumil, lansia) dan insentif kader kesehatan terealisasi secara optimal.
 - Peningkatan/rehabilitasi sarana air bersih dan pemeliharaan fasilitas umum berhasil dirampungkan.
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan (Realisasi: > 95%):
- Kegiatan pembinaan LINMAS, kesiapsiagaan poskamling, serta peringatan hari besar keagamaan dan nasional terlaksana lancar.
 - Gelar budaya, pelestarian seni tradisi lokal, serta pembinaan Karang Taruna dan kegiatan keolahragaan pemuda berjalan aktif.
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Realisasi: >90%):
- Pelatihan ketrampilan UMKM, pendampingan kelompok tani/ternak, serta peningkatan kapasitas BUMDes berhasil dilaksanakan.
 - Pelatihan teknologi tepat guna untuk pengolahan hasil panen warga terlaksana sesuai alokasi.
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat & Mendesak (Realisasi: 100%):
- Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa terdistribusi 100% tepat waktu kepada seluruh Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
 - Penanganan tanggap darurat bencana alam skala lokal dan mitigasi risiko wilayah berjalan cepat.

Pelaksanaan kegiatan APB Kalurahan Kedungpoh TA 2025 memberikan manfaat langsung dan dampak positif bagi kehidupan warga:

1. Aksesibilitas Mobilitas dan Ekonomi: Pembangunan cor blok jalan dan drainase membuat jalan antar-padukuhan lebih aman, nyaman, bebas genangan, serta mempermudah pengangkutan hasil bumi dan transportasi harian warga.
2. Pelayanan Administrasi Lebih Cepat dan Efisien: Digitalisasi layanan melalui Sistem Informasi Desa dan pembaruan perangkat komputer balai desa memangkas waktu pengurusan surat-menyurat dan perizinan.
3. Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Gizi Masyarakat: Kegiatan Posyandu rutin dan pemberian makanan tambahan (PMT) berhasil menekan risiko stunting pada balita serta meningkatkan pemantauan kesehatan lansia.
4. Peningkatan Hasil Pertanian dan Ketahanan Pangan: Pembinaan kelompok tani dan pembangunan sarana irigasi/air pertanian membantu meningkatkan produktivitas olah lahan.

5. Keterampilan Baru dan Kemandirian Ekonomi: Pelatihan kewirausahaan bagi kelompok perempuan dan UMKM memberikan wawasan keterampilan baru dalam pengolahan serta pemasaran produk lokal.
6. Perlindungan Sosial Warga Rentan: Penyaluran BLT Desa menjadi jaring pengaman sosial yang menjaga daya beli keluarga kurang mampu.

Dalam pelaksanaan program kerja sepanjang TA 2025, Pemerintah Kalurahan Kedungpoh mengidentifikasi beberapa faktor hambatan:

1. Kapasitas Pelaksana Kegiatan (TPK): Masih bervariasinya pemahaman teknis penyusunan administrasi dan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) pada Tim Pelaksana Kegiatan di tingkat padukuhan.
2. Partisipasi dan Swadaya Masyarakat: Tingkat partisipasi gotong-royong warga bervariasi antar-padukuhan, terutama untuk kegiatan fisik yang membutuhkan dukungan tenaga lokal di jam kerja harian.
3. Penyesuaian Kebijakan dan Regulasi: Penyesuaian aturan teknis serta pembaruan aplikasi administrasi keuangan dari pemerintah pusat/daerah memerlukan waktu adaptasi tambahan.

Sebagai wujud perbaikan berkelanjutan, Pemerintah Kalurahan Kedungpoh menetapkan langkah tindak lanjut untuk penyusunan RKP/APB Kalurahan mendatang :

1. Peningkatan Kapasitas SDM TPK & Pamong: Mengadakan bimbingan teknis berkala mengenai pengadaan barang/jasa desa dan penyusunan LPJ agar tertib administrasi dan selesai tepat waktu.
2. Pengalokasian Anggaran Pemeliharaan Aset : Mengalokasikan dana perawatan rutin bagi infrastruktur fisik dan sarana umum yang telah dibangun agar memiliki usia pakai yang panjang.
3. Optimalisasi Penguatan Partisipasi Warga : Meningkatkan sosialisasi dan pendekatan partisipatif melalui Musdus untuk membangkitkan semangat gotong royong warga.
4. Pengembangan Pemasaran Usaha BUMDes dan UMKM: Melanjutkan program pembinaan paska-pelatihan berupa pendampingan *digital marketing* dan perizinan usaha bagi UMKM lokal.

B. Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJM Kalurahan Dan Prioritas Pembangunan

Pembangunan Kalurahan Kedungpoh dilaksanakan berdasarkan asas keterpaduan, partisipatif, dan berkelanjutan. Seiring dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terjadi penyesuaian masa jabatan Lurah dari 6 (enam) tahun menjadi 8 (delapan) tahun. Dampak dari perubahan regulasi ini mewajibkan Pemerintah Kalurahan Kedungpoh untuk melakukan penyesuaian.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal), proses identifikasi masalah menjadi tahap analisis paling mendasar. Tahap ini bertujuan membedah kondisi objektif di wilayah Kalurahan Kedungpoh, mengukur kesenjangan (*gap analysis*) antara target kinerja jangka menengah dengan kondisi riil di lapangan, serta menyusun skala prioritas program yang presisi dan akuntabel.

Guna memastikan masalah yang teridentifikasi memiliki basis penyelesaian yang jelas, kerangka identifikasi masalah dilakukan dengan membedah 4 (empat) elemen kunci pada setiap bidang pembangunan:

1. Akar Masalah (*What*): Bentuk kesenjangan atau kendala mendasar yang dihadapi warga dan Pemerintah Kalurahan Kedungpoh.
2. Kausalitas (*Why*): Faktor penyebab terjadinya permasalahan, baik kendala geografis, keterbatasan anggaran, keterbatasan sarana, maupun kapasitas SDM.
3. Dampak (*Impact*): Konsekuensi sosial, ekonomi, kesehatan, dan lingkungan jika permasalahan dibiarkan tanpa intervensi program.
4. Urgensi (*Urgency*): Alasan strategis mengapa masalah tersebut wajib dijadikan prioritas dalam RKPKal dan APBKal tahun berjalan.

Kalurahan Kedungpoh memiliki luas wilayah 1.079,98 hektar dengan topografi berbukit pada ketinggian 200 hingga 500 mdpl. Secara administratif, Kalurahan Kedungpoh terbagi atas 10 Padukuhan (Kedungpoh Kidul, Kedungpoh Kulon, Kedungpoh Lor, Kedungpoh Tengah, Sinom, Gentungan, Mojosari, Nglorog, Gojo, dan Klayar) dengan total penduduk sebanyak 6.868 jiwa (2.183 KK).

Dari aspek kesejahteraan dan mata pencaharian, mayoritas warga bertumpu pada sektor pertanian (1.999 orang), perdagangan/wiraswasta (1.069 orang), serta buruh dan industri pengolahan. Berdasarkan standar kriteria penerima bantuan sosial, masih tercatat 1.834 jiwa penduduk dalam kategori miskin, serta terdapat keterbatasan sarana sanitasi dasar dan infrastruktur pemukiman di beberapa lokasi padukuhan. Kesenjangan ini menjadi acuan utama dalam inventarisasi permasalahan per bidang.

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan

A. Identifikasi Masalah Utama

1. Keterbatasan Fasilitas Administrasi dan Sarana Balai Padukuhan: Terdapat Balai Padukuhan dan Pos Ronda/Balai RT yang memerlukan renovasi fisik, belum memiliki fasilitas toilet layak, serta belum representatifnya Balai Kalurahan untuk kegiatan rapat terbatas maupun acara publik skala besar.
2. Keterbatasan Infrastruktur Teknologi Informasi (TIK): Akses jaringan internet yang belum stabil dan belum merata di beberapa wilayah padukuhan, sehingga menghambat optimalisasi pelayanan publik digital dan integrasi data berbasis IT.
3. Penyempurnaan Tata Kelola Administrasi dan Kebutuhan Sarana Kerja: Masih terdapat kekosongan formasi Perangkat Kalurahan Kedungpoh, keterbatasan mebel/ peralatan kantor, perlunya pembaruan basis data kalurahan yang terintegrasi untuk perencanaan, serta masih tersisnya bidang tanah warga maupun tanah kas desa yang belum bersertifikat.
4. Jaminan Sosial Dasar Aparat dan Warga: Masih terdapat warga yang belum memiliki kepemilikan jaminan kesehatan BPJS.

B. Analisis Kausalitas, Dampak, dan Urgensi

- Penyebab: Terbatasnya alokasi Dana Desa (ADD) dan Pendapatan Asli Kalurahan (PAK) untuk pembangunan fisik sarana perkantoran, serta kendala geografis penerimaan sinyal telekomunikasi.
- Dampak: Pelayanan publik kurang optimal, efisiensi kerja aparatur terhambat, dan keterbatasan data yang valid mengganggu ketepatan sasaran program pembangunan.
- Urgensi: Penataan sarana dan tata kelola merupakan fondasi utama pendorong keberhasilan pembangunan di empat bidang lainnya.

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan

A. Identifikasi Masalah Utama

1. Aksesibilitas dan Infrastruktur Jalan Lingkungan:
 - o Masih ada ruas jalan antar-dusun, jalan usaha tani, dan jalan lingkungan berupa tanah/batuan liar yang becek saat musim hujan dan berdebu saat kemarau.
 - o Kerusakan fisik pada jalan cor blok dan jalan aspal lama yang belum mendapatkan perbaikan/pengecoran ulang sepanjang ratusan meter di hampir seluruh padukuhan.
 - o Belum memadainya sarana pendukung jalan seperti Talud Penahan Tanah (TPT), drainase/selokan permanen untuk mencegah erosi/banjir, box culvert (deker), serta Penerangan Jalan Umum (PJU) di titik-titik rawan kecelakaan dan kriminalitas.
2. Kualitas Permukiman dan Sanitasi Dasar:
 - o Rumah Tidak Layak Huni (RTLH): Terinventarisasi rumah warga yang masih berlantai tanah/semen rusak, berdinding bambu/gedhek, dan berstruktur tidak permanen.
 - o Sanitasi dan Jamban Sehat: Masih ditemukan penggunaan WC cemplung/jamban belum sehat serta rumah warga dan fasilitas umum (balai dusun/pos ronda) yang belum memiliki sarana MCK/WC mandiri.
3. Ketersediaan Air Bersih dan Pengelolaan Sampah:
 - o Kelangkaan air bersih pada musim kemarau panjang, akibat belum terhubungnya perpipaan, mesin sumur bor yang sering macet, serta kapasitas tangki penampungan (tandon) yang terbatas.
 - o Belum berfungsinya tempat penampungan dan sistem pengolahan sampah akhir (TPA/TPS3R) skala kalurahan, sehingga masih marak pembuangan sampah sembarangan yang berpotensi menyumbat saluran drainase.

B. Analisis Kausalitas, Dampak, dan Urgensi

- Penyebab: Luas wilayah Kalurahan Kedungpoh (1.079 Ha) dengan kondisi topografi berbukit membutuhkan biaya infrastruktur yang sangat tinggi melebihi kapasitas APBD kalurahan tahunan.
- Dampak: Tingginya biaya mobilitas warga, risiko penyakit berbasis lingkungan (DBD, TBC, diare).
- Urgensi: Pemenuhan infrastruktur jalan, RTLH, dan sanitasi merupakan kebutuhan dasar (*basic needs*) untuk meningkatkan standar hidup manusia.

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

A. Identifikasi Masalah Utama

1. Penguatan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (LKK): Kurang optimalnya koordinasi, keaktifan, dan perumusan program kerja pada organisasi pemuda (Karang Taruna) serta Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMK/LPMD) akibat keterbatasan alokasi dana kegiatan sosial.
2. Sarana Keagamaan dan Pendidikan Non-Formal:
 - Kekurangan tenaga pengajar (guru TPA) dan fasilitas sarana-prasarana pendukung belajar di TPA/Taman Pendidikan Al-Qur'an.
 - Kebutuhan renovasi tempat ibadah (masjid/mushola), fasilitas wudhu, toilet, dan sarana penerangan.
3. Pelestarian Seni Budaya dan Olahraga:
 - Walaupun Kalurahan Kedungpoh memiliki 31 kelompok kesenian (Jatilan, Reog, Karawitan, Gejog Lesung, dll.), sebagian besar kelompok masih kekurangan modal pengadaan kostum, alat musik tradisional, serta belum tersedianya gedung/padepokan seni yang memadai.
 - Masih minimnya fasilitas lapangan olahraga dan peralatan olahraga bagi kelompok pemuda di padukuhan.

B. Analisis Kausalitas, Dampak, dan Urgensi

- Penyebab: Keterbatasan insentif dan pembinaan bertahap bagi pendorong kegiatan sosial, budaya, dan keagamaan.
- Dampak: Potensi degradasi karakter generasi muda, kurang terwadahnya kreativitas pemuda, dan pudarnya kearifan lokal gotong-royong.
- Urgensi: Pembinaan kemasyarakatan penting untuk menjaga ketenteraman, ketertiban, dan keharmonisan sosial warga kalurahan.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

A. Identifikasi Masalah Utama

1. Sektor Pertanian dan Peternakan (Sektor Utama):
 - Irigasi dan Air Pertanian: Terbatasnya jaringan irigasi dan belum adanya pasokan air mencukupi saat musim kemarau, sehingga mayoritas lahan sawah (80 Ha) bersifat tadah hujan yang memicu ancaman gagal panen.
 - Kelangkaan Input Produksi: Kesulitan petani dalam memperoleh alokasi pupuk bersubsidi, bibit unggul tanaman pangan/hortikultura, serta

obat-obatan penanggulangan hama (wereng, tikus, lalat buah).

- o Keterbatasan Alat dan Teknologi: Minimnya Alsintan (alat mesin pertanian modern) serta belum optimalnya manajemen pengolahan limbah peternakan (seperti pemanfaatan Unit Pengolahan Pupuk Organik / UPPO).
- 2. Pengembangan UMKM dan Industri Rumah Tangga (*Home Industry*):
 - o Keterbatasan modal usaha, alat produksi modern, dan akses pemasaran bagi pelaku UMKM (kerajinan kayu, VCO, tempe, makanan olahan, dan bengkel).
 - o Adanya ancaman praktik pinjaman tidak resmi/koperasi ilegal (*Bank Plecit*) yang merugikan keuangan warga dan pelaku usaha kecil di tingkat padukuhan.
- 3. Optimalisasi Sektor Pariwisata Desa:
 - o Belum optimalnya pengelolaan dan promosi objek wisata lokal.
 - o Terbatasnya sarana pendukung pariwisata seperti akses jalan masuk, area parkir, kantin/kios UMKM, fasilitas toilet umum,
 - o Tidak aktifnya pengurus Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis).

B. Analisis Kausalitas, Dampak, dan Urgensi

- Penyebab: Minimnya pendampingan teknologi tepat guna (TTG), keterbatasan akses perbankan resmi, serta kelembagaan ekonomi lokal (BUMKAL) yang belum maksimal menjangkau unit usaha warga.
- Dampak: Rendahnya produktivitas hasil panen, rendahnya pendapatan per kapita warga, serta kerentanan warga terhadap jeratan utang informal.
- Urgensi: Pemberdayaan ekonomi merupakan kunci utama dalam pengentasan kemiskinan 1.834 warga miskin di Kedungpoh.

Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Kalurahan

A. Identifikasi Masalah Utama

- 1. Kerentanan Bencana Alam:
 - o Ancaman Tanah Longsor: Beberapa titik tebing dan badan jalan terancam longsor saat curah hujan tinggi akibat belum tersedianya talud pengaman (*retaining wall*).
 - o Ancaman Banjir: Luapan air sungai/drainase yang tidak mampu menampung debit air hujan berpotensi menggenangi rumah pemukiman warga di sekitar Padukuhan Klayar.
 - o Ancaman Kekeringan: Bencana kekeringan rutin tahunan yang

berdampak pada krisis air bersih warga dan air irigasi pertanian.

2. Perlindungan Kelompok Rentan dan Keadaan Mendesak:

- o Masih adanya warga disabilitas (difabel), lansia terlantar, dan warga jompo di berbagai padukuhan yang membutuhkan kursi roda, jaminan sosial, dan penanganan gizi.
- o Ancaman penyakit menular musiman seperti Demam Berdarah Dengue (DBD), TBC akibat belum meratanya kesadaran sanitasi dan kebersihan lingkungan.

B. Analisis Kausalitas, Dampak, dan Urgensi

- Penyebab: Kondisi geografis perbukitan dengan struktur tanah rawan erosi serta kondisi iklim ekstrem yang sulit diprediksi.
- Dampak: Timbulnya kerugian material, kerusakan fasilitas publik, ancaman keselamatan jiwa warga, serta penurunan kualitas kesehatan.
- Urgensi: Penanganan ketahanan bencana dan kelompok rentan bersifat *urgent* (mendesak) untuk menjamin keselamatan dasar seluruh warga masyarakat.

MATRIKS PRIORITAS PENANGANAN MASALAH

No	Bidang Pembangunan	Akar Masalah Utama	Dampak Sosial - Ekonomi	Urgensi Program Penanganan
1	Pemerintahan	Sarana balai padukuhan belum memadai; jaringan TIK terbatas; data kalurahan belum terpadu.	Pelayanan publik lambat; akuntabilitas dan efisiensi perencanaan terganggu.	Perbaikan sarana pelayanan, digitalisasi data, dan penataan kelembagaan.
2	Pembangunan	Kerusakan jalan & drainase; banyaknya RTLH; keterbatasan air bersih & MCK.	Mobilitas terhambat; risiko penyakit lingkungan; kesejahteraan rendah.	Cor blok jalan, pembangunan talud/drainase, pemenuhan air bersih & RTLH.

3	Pembinaan	Lembaga LKK kurang aktif; fasilitas TPA & kelompok seni budaya minim alat/modal.	Penurunan keterlibatan pemuda dan potensi pudarnya tradisi budaya lokal.	Pelatihan kelembagaan, pembinaan Karang Taruna, fasilitasi seni budaya.
4	Pemberdayaan	Irigasi terbatas; kelangkaan pupuk/bibit; modal UMKM minim; Pokdarwis pasif.	Produktivitas tani turun; jeratan <i>Bank Plect</i> ; pariwisata belum menyumbang PAK.	Bantuan Alsintan & irigasi, bantuan modal UMKM via BUMKAL, revitalisasi wisata.
5	Penanggulangan Bencana	Kerentanan longsor & kekeringan; perlindungan difabel/lansia belum merata.	Kerusakan pemukiman; krisis air; kelompok rentan tidak terlayani.	Pembangunan talud pengaman, dropping/sumur air bersih, program Kalurahan Tanggap Bencana.

Rangkaian identifikasi masalah dalam dokumen ini merupakan potret komprehensif atas kondisi riil pembangunan di Kalurahan Kedungpoh Periode 2020–2027. Berdasarkan analisis kausalitas dan urgensi yang telah dipaparkan, dirumuskan beberapa rekomendasi strategis bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal):

1. Penguatan Prioritas Anggaran: Mengalokasikan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) secara terfokus pada penanganan infrastruktur mendasar (akses jalan, air bersih, sanitasi, dan RTLH) yang berdampak langsung pada penurunan angka kemiskinan.
2. Sinergi Kemitraan Pemerintah: Memaksimalkan pendanaan melalui Pagu Indikator Wilayah Kapanewon (PIWK), Pagu Indikator Sektor (PIS) APBD Kabupaten Gunungkidul, APBD DIY (Dana Keistimewaan), serta

APBN untuk mendanai program skala besar yang tidak terjangkau oleh APBKal.

3. Pemberdayaan Ekonomi Berkelanjutan: Mengoptimalkan peran BUMKal Kedungpoh dalam penyediaan permodalan UMKM guna memberantas keberadaan *Bank Plecit*, serta memfasilitasi integrasi pariwisata lokal.
4. Mitigasi dan Penanganan Kelompok Rentan: Mengarusutamakan program proteksi sosial bagi lansia, penyandang disabilitas, serta mitigasi bencana berbasis masyarakat (Kalurahan Tanggap Bencana).

Dokumen ini menjadi acuan resmi dan legalitas moral bagi Pemerintah Kalurahan Kedungpoh, BAMUSKAL, serta seluruh pemangku kepentingan dalam menetapkan arah kebijakan pembangunan kalurahan yang adil, merata, dan berkelanjutan.

BAB IV

PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN KALURAHAN TAHUN 2027

Prioritas Program Pembangunan Kalurahan Kedungpoh Tahun 2027 disusun bukan sekadar sebagai daftar keinginan kegiatan, melainkan sebagai penjelasan arah kebijakan strategis pembangunan kalurahan selama satu tahun anggaran. Prioritas ini ditetapkan berdasarkan:

1. Hasil Evaluasi Pembangunan Tahun Sebelumnya: Menilai ketercapaian target dan menyelesaikan sisa program yang belum terealisasi pada tahun berjalan.
2. Target RPJM Kalurahan Kedungpoh Periode 2020–2027: Penyesuaian masa jabatan berdasarkan UU No. 3 Tahun 2024 untuk memastikan seluruh sasaran jangka menengah tercapai secara akuntabel.
3. Aspirasi Masyarakat: Hasil penjaringan gagasan melalui Musyawarah Padukuhan (Musduk) dan Musyawarah Kalurahan (Muskal).
4. Kebijakan Pemerintah di Atasnya: Penyelarasan dengan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul, APBD DIY (Dana Keistimewaan), serta prioritas penggunaan Dana Desa dari Pemerintah Pusat.

Penyusunan prioritas pembangunan Tahun 2027 bertujuan untuk mencapai kondisi objektif sebagai berikut:

- Meningkatkan Kualitas Infrastruktur: Mempercepat konektivitas jalan lingkungan, jalan usaha tani, dan jaringan air bersih/sanitasi dasar.
- Memperkuat Perekonomian Kalurahan dan Ketahanan Pangan: Mengembangkan UMKM, memfasilitasi pemasaran produk lokal, meningkatkan hasil pertanian, dan memberantas *Bank Plecit* melalui penguatan BUMKal.
- Mengurangi Kemiskinan dan Mengentaskan Stunting: Memberikan perlindungan sosial yang tepat sasaran, pemenuhan gizi balita/ibu hamil, serta rehab RTLH bagi warga miskin (DESIL 1–5).
- Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan SDM: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan berbasis TIK serta meningkatkan kapasitas kelembagaan warga.
- Menjaga Kelestarian Lingkungan dan Kesiapsiagaan Bencana: Membangun sarana mitigasi longsor/kekeringan serta memelihara lingkungan hidup yang bersih.

Pada Tahun Anggaran 2027, Pemerintah Kalurahan Kedungpoh memfokuskan alokasi sumber daya pada 6 (enam) bidang prioritas utama:

1. Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik:
Fokus: Digitalisasi pelayanan publik, pembaruan basis data kalurahan terpadu, serta pemenuhan mebeler/sarana kerja perkantoran dan balai kalurahan.
2. Pembangunan Infrastruktur Perdesaan dan Permukiman:
Fokus: Pengecoran jalan lingkungan dan jalan usaha tani, pembangunan Talud Penahan Tanah (TPT), perbaikan RTLH, serta penyediaan fasilitas air bersih dan MCK/sanitasi sehat.
3. Pengembangan Ekonomi Lokal dan Ketahanan Pangan:
Fokus: Fasilitasi pemasaran UMKM, pembangunan/pemeliharaan sarana irigasi pertanian, penyediaan Alsintan, dan pelatihan pengolahan pupuk organik (UPPO).
4. Peningkatan Pendidikan, Kesehatan, Penurunan Kemiskinan, dan Stunting:
Fokus: Penyuluhan/Pelatihan Masyarakat tentang pencegahan stunting, pelatihan kader Posyandu, insentif/sarana TPA, bantuan jaminan sosial/BPJS bagi warga rentan, dan bantuan modal bagi warga miskin.
5. Pembinaan Kemasyarakatan dan Pelestarian Budaya:
Fokus: Pembinaan Karang Taruna, dan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan.
6. Pelestarian Lingkungan dan Kesiapsiagaan Bencana:
Fokus: pengadaan cadangan logistik/dropping air bersih saat kemarau, serta Pembinaan/Operasional Kalurahan Tanggap Bencana (DESTANA).

Matriks Target Kinerja Prioritas Pembangunan Kalurahan Tahun 2027

Misi	Tujuan	Sasaran	Program Utama	Indikator Kinerja Utama
Misi 1: Meningkatkan Kualitas Infrastruktur	Meningkatkan aksesibilitas wilayah	Terwujudnya jalan layak, TPT pengaman,	Pembangunan dan Pemeliharaan	Panjang jalan cor blok meningkat

r dan Permukiman Kalurahan	dan ketersediaan sarana dasar warga	air bersih, dan rumah layak huni	Infrastruktur Perdesaan	(m), unit RTLH terehabilitasi, sarana air bersih berfungsi 100%
Misi 2: Meningkatkan Perekonomian Kalurahan dan Ketahanan Pangan	Meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengatasi kendala pemasaran produk	Berkembangnya UMKM lokal, terlepasnya warga dari <i>Bank Plecit</i> , dan hasil tani meningkat	Penguatan BUMKal, Pelatihan UMKM, dan Pengembangan Irigasi/Ketahanan Pangan	Jumlah UMKM terfasilitasi pasar meningkat, produksi padi/pala wija meningkat, PAKal meningkat
Misi 3: Mengurangi Angka Kemiskinan dan Penanganan Stunting	Meningkatkan derajat kesehatan, gizi, dan kesejahteraan masyarakat	Terbebasnya balita dari stunting dan berkurangnya warga terdaftar DESIL 1-5	Penanganan Stunting, Sanitasi Sehat, dan Pemberdayaan Keluarga Miskin	Angka stunting turun hingga 10%, angka kemiskinan berkurang
Misi 4: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan	Meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan	Terwujudnya pelayanan digital berbasis TIK dan data	Digitalisasi Pelayanan dan Penataan Sarana Perkantoran Kalurahan	Waktu pelayanan publik lebih cepat, jaringan

dan Melayani	publik kalurahan	terpadu valid		internet merata, data kalurahan terintegra si
Misi 5: Memperkuat Pembinaan Kemasyarak atan dan Kesiapsiaga an Bencana	Meningkat kan partisipasi warga, pelestaria n budaya, serta keselamat an dari bencana	Aktifnya lembaga Karang Taruna/LK K, terlestariny a seni budaya, dan terwujudny a wilayah tanggap bencana	Pembinaan LKK, Seni Budaya, serta Mitigasi & Tanggap Bencana	Jumlah kelompok seni/olahr aga terfasilitas i, titik rawan longsor tertangani

BAB V

PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Kedungpoh Tahun 2027 ini disusun bukan hanya sekadar pemenuhan kewajiban administratif, melainkan sebagai pedoman operasional utama dalam pelaksanaan pembangunan selama satu tahun anggaran.

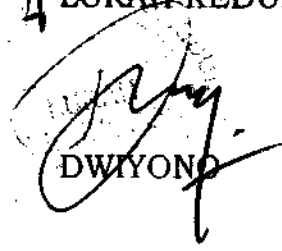
Seluruh program dan kegiatan prioritas yang tertuang dalam dokumen ini merupakan kristalisasi dari hasil evaluasi RPJMKal, kesepakatan musyawarah warga dari tingkat padukuhan, serta keselarasan dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Oleh karena itu, Tim Penyusun bersama Pemerintah Kalurahan Kedungpoh dan BAMUSKAL berkomitmen penuh untuk melaksanakan setiap tahapan kegiatan secara transparan, partisipatif, dan akuntabel.

Diharapkan dengan implementasi RKPKal Tahun 2027 secara konsisten dan didukung penuh oleh seluruh elemen masyarakat, Kalurahan Kedungpoh dapat:

1. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis digital;
2. Mempercepat pembangunan infrastruktur dan pemenuhan sarana dasar permukiman;
3. Memperkuat perekonomian masyarakat, UMKM, dan ketahanan pangan desa; serta
4. Mengurangi angka kemiskinan dan stunting demi mewujudkan masyarakat Kedungpoh yang sejahtera, maju, dan berdaya saing.

Kedungpoh, ..30. September 2026

A LURAH KEDUNGPOH,


DWYONO

**BERITA ACARA HASIL KEPUTUSAN MUSYAWARAH KALURAHAN
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP- KALURAHAN KEDUNGPOH
TAHUN 2026**

Dalam rangka Perencanaan pembangunan Kalurahan tahun Anggaran 2027 di Kalurahan Kedungpoh, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul, DIY maka pada:

Hari dan Tanggal : Kamis, 23 Juli 2026
J a m : dari pukul 09.00 s.d. pukul 12.00 WIB
Tempat : Balai Kalurahan Kedungpoh

Telah diselenggarakan pertemuan Musyawarah Kalurahan dalam rangka Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Kedungpoh tahun anggaran 2027 yang dihadiri oleh wakil-wakil dari masyarakat serta unsur lain yang terkait sebagaimana tercantum dalam lampiran daftar hadir.

Materi atau topik yang dibahas dalam forum ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan nara sumber adalah :

A. Materi Bahasan

Materi yang dibahas dalam musyawarah Kalurahan ini antara lain:

1. Pencermatan ulang dokumen RPJMKalurahan;
2. Menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJMKalurahan

B. Unsur Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pimpinan Musyawarah	: Prpto Sedyono, SPd, MM	dari Ketua Bamuskal
Sekretaris / Notulis	: Akhid Hermawan	dari Sekretaris Bamuskal
Narasumber	: 1. Dwiyono	dari Lurah Kedungpoh
	2. Sugito	dari Panewu Nglipar

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi bahasan sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya seluruh peserta musyawarah dalam rangka perencanaan pembangunan Kalurahan memutuskan dan menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari musrenbang ini, yaitu :

1. Menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJMKalurahan
2. Proses dan hasil kesepakatan Muskal penyusunan RKPKalurahan dituangkan dalam Berita Acara Muskal Penyusunan RKPKalurahan.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Muskal,



Lurah Kedungpoh,

DWIYONO

Wakil Masyarakat

(Gurawan)

Daftar Hadir
Musyawarah Kalurahan Tahun 2026

Hari
Tanggal
Tempat

Kamis
23 Juli 2026
Padan Desa Kadungpon

No	Nama	Alamat	Jabatan/ Unsur dari	Tanda Tangan	
1	Suparman	Emam	Dukuh	1	
2	Wastaman	Emam	Dukuh	2	
3	Sugeng Buti S	Kop Kalon	PW	3	
4	Alehid Hernani	Ngleng	Kader	4	
5	Rudi Andaka	Kop Kidul	Banmiskal	5	
6	Farida Wahyu . n	Kdp . Kidul	Kader	6	
7	SULARMI	MOJAWADI	Kader	7	
8	Tukun	Pandun	Ngleng	8	
9	Gunawan	Ngleng	Dukuh Nany	9	
10	Parjiman	Kelayan.	Wk. Brm.	10	
11	Pangur	Kdp . Kalon	Kpm	11	
12	Atile MR.	Kdp Tengat	Kader lmsig	12	
13	Suciati utami	Bojo	Kader	13	
14	Fani	Bojo	Kmpaudi.	14	
15	Sulkarti	Op. Lunan	Dukuh	15	
16	Sukjo	Kop Kidul	Dukuh	16	
17	Adica Setira	Kdp. Kidul	KKN	17	
18	Najmi Fakhira	Kdp. Kidul	KKN	18	
19	Dwiyo	—	Kader	19	
20	Plenwade	BPP Ngleng	PPL	20	
21	Dehana Dita	BPP Ngleng	PPL	21	
22	Iman	Goyu	Banmiskal	22	
23	Suyanti	Op. Kidul	desa prima	23	

24	Haibani >	Kdp Lar	Bawaler		24	gfi
25	Sutrisno	Nglorog		25		Ng
26	Doko . S	gajo			26	g.
27	SP4 Wahyuni	Kedungkulon	Utusan durun	27		
28	Triatna	Majsa	Bukit		28	
29	Tugeman	KDP Tengah	RW	29		EL
30	Eni Lishiyowati	Gojo	Kun Nglipe		30	EE
31	Ichannudin .	Maah	Pada Nglipe	31		
32	A. Wuma	Onatam	Ngapan		32	gus
33	Joko Decen	Kdy. Tengah	Dicun	33		
34	Didik Wibawa	Babinsa	Nglipe		34	
35	Rusyo	Gojo	Kdy. Nglipe	35		
36	Kumarwata	PLD			36	
37	Agung Widay S	PLD	Nglipe	37		
38	Tri Ashvi	Gojo	Bamuskal		38	
39	Prizanto	Kdp Lar	Jagabaya	39		
40	Muru Harsono	Majkan	Pamitras		40	
41	Sri Mulyani	Gojo		41		
42	Neni Haryani	ILP	Kdp Lar		42	
43	Mike Rahmawati	Majosari	Pkt	43		
44	Tim M'g	Kdp Lar	Dek		44	
45	Sabur Kolum	Pkt	Nglipe	45		
46	Tejo . S.	men	Klagen		46	
47	Ngadiyana	Korwilbda	Nglipe	47		
48	Istia M	Pdp Kulon	Stat		48	
49	Asep P	Gojo	Karangtaras	49		
50	Purwanto	Pdp Kulon	Pangrasta		50	

51	Kuan student p	Ngung	Diken	51	
52	Nack. A.	Rguy	Pick	52	
53	Pdib N	Fsp Tengah	Tutabksana	53	
54					54
55				55	
56					56
57				57	
58					58
59				59	
60					60
61				61	
62					62
63				63	
64					64
65				65	
66					66
67				67	
68					68
69				69	
70					70
71				71	
72					72
73				73	
74					74
75				75	
76					76
77				77	

FORMAT II.2. HASIL PENCERMATAN RPJM KALURAHAN
RENCANA KEGIATAN HASIL PENCERMATAN RPJM KALURAHAN

KALURAHAN : KEDUNGPOH
KAPANEWON : NGLIPAR
KABUPATEN : GUNUNGKIDUL
PROVINSI : DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

No	Bidang Kegiatan	Volume	Mendukung SDGs ke-	Perkiraan Pagu Dana (Rp.)	Lokasi/ Padukuhan	Ket
1	2	3	4	5	6	7
A	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA			1.196.432.755		
1	Penghasilan Tetap Kepala Desa	12	18	44.040.000	Kedungpoh	
2	Tunjangan Hari Raya Kepala Desa	1	18	3.670.000	Kedungpoh	
3	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	228	18	573.964.200	Kedungpoh	
4	Tunjangan Hari Raya Perangkat Desa	19	18	47.830.350	Kedungpoh	
5	BPJS Ketenagakerjaan Lurah	12	18	2.748.096	Kedungpoh	
6	BPJS Kesehatan Pamong Kalurahan	24	18	2.369.640	Kedungpoh	
7	BPJS Ketenagakerjaan Pamong Kalurahan	228	18	35.815.368	Kedungpoh	
8	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	1	18	125.196.186	Kedungpoh	
9	Tunjangan BPD	108	18	55.800.000	Kedungpoh	
10	Tunjangan Hari Raya BPD	9	18	4.650.000	Kedungpoh	
11	BPJS Ketenagakerjaan BPD	108	18	597.780	Kedungpoh	
12	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	1	18	6.580.775	Kedungpoh	
13	Insentif RT/RW	696	18	27.000.000	Kedungpoh	
14	BPJS Ketenagakerjaan RT/RW	696	18	3.852.360	Kedungpoh	
15	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	1	18	10.935.000	Kedungpoh	
16	Belanja AC/kipas angin kantor desa	1	18	16.605.000	Kedungpoh	
17	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	1	18	5.000.000	Kedungpoh	
18	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	1	18	5.000.000	Kedungpoh	
19	Pengadaan Peralatan Kerja	2	18	5.000.000	Kedungpoh	
20	Pengadaan Mebelair	1	18	10.000.000	Kedungpoh	
21	Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Mebel	1	18	3.000.000	Kedungpoh	
22	Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	2	18	4.700.000	Kedungpoh	
23	Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	1	18	6.500.000	Kedungpoh	
24	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	1	1,2,3,4,5 ,6,8,9,10 ,12,16,17 ,18	5.000.000	Kedungpoh	
25	Pelayanan Administrasi Umum dan Kepe	1	18	5.000.000	Kedungpoh	
26	Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	1	18	5.000.000	Kedungpoh	
27	Pemutakhiran data DTKS	1	10,16	1.200.000	Kedungpoh	

28	Penyusunan Monografi Desa	1	1,2,3,4,5 6,8,9,10 12,16,17 18	1.000.000	Kedungpoh	
29	Pemutakhiran data SDGs	1	semua poin	5.000.000	Kedungpoh	
30	Pemutakhiran data IDM	1	1,2,3,4,5 6,8,9,10 12,16,17 18	3.500.000	Kedungpoh	
31	Musyawarah Kalurahan	2	1,2,3,4,5 6,8,9,10 12,16,17 18	4.000.000	Kedungpoh	
32	Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan	2	1,2,3,4,5 6,8,9,10 12,16,17 18	4.000.000	Kedungpoh	
33	Musyawarah Padukuhan	1	1,2,3,4,5 6,8,9,10 12,16,17 18	2.875.000	Kedungpoh	
34	Musyawarah Khusus	5	1,2,3,4,5 6,8,9,10 12,16,17 18	2.000.000	Kedungpoh	
35	Penyusunan RPKKal	1	18	12.000.000	Kedungpoh	
36	Penyusunan RPKKal Perubahan	1	18	1.250.000	Kedungpoh	
37	Penyusunan APBKal	1	18	2.000.000	Kedungpoh	
38	Penyusunan APBKal Perubahan	1	18	1.000.000	Kedungpoh	
39	Penyusunan Laporan Realisasi APBKal	1	18	1.000.000	Kedungpoh	
40	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	1	18	4.000.000	Kedungpoh	
41	Penyusunan Perkal Pengelolaan Aset Kalurahan	1	18	2.000.000	Kedungpoh	
42	Penyusunan Perkal Pungutan Kalurahan	1	18	3.000.000	Kedungpoh	
43	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1	18	3.753.000	Kedungpoh	
44	Pengembangan Sistem Informasi Desa	1	9	10.000.000	Kedungpoh	
45	Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pemilihan BPD	1	9	10.000.000	Kedungpoh	
46	Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades	1	9	70.000.000	Kedungpoh	
47	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	14	18	5.000.000	Kedungpoh	
48	Pengisian Perangkat Desa	1	18	25.000.000	Kedungpoh	
49	Perjanjian Kinerja Lurah	1	18	2.000.000	Kedungpoh	
50	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	2	18	3.000.000	Kedungpoh	
51	Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	1	18	2.000.000	Kedungpoh	
2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA			1.007.845.000		
1	Insentif Guru PAUD	300	3	60.300.000	Kedungpoh	
2	Insentif Guru TPA	70	3	21.025.000	Kedungpoh	
3	Pelatihan/ Pembinaan Guru TPA	12	3	2.000.000	Kedungpoh	
4	Pemeliharaan Gamelan	5	9	5.000.000	Kedungpoh	
5	Operasional Posyandu	10	3	5.000.000	Kedungpoh	
6	Honor kader Posyandu Balita	50	3	30.000.000	Kedungpoh	
7	Honor kader ILP	24	3	3.600.000	Kedungpoh	
8	Honor kader Posyandu Lansia	50	3	30.000.000	Kedungpoh	
9	Penyuluhan Stunting	1	3	8.175.000	Kedungpoh	

10	Pelatihan Bidang Kesehatan	1	3	3.000.000	Kedungpoh	
11	Penyuluhan Kampung KB	1	3	3.350.000	Kedungpoh	
12	Penyuluhan Ibu Hamil	1	3	625.000	Kedungpoh	
13	Operasional Kalurahan Siaga	1	3	4.000.000	Kedungpoh	
14	Operasional RDS	1	3	8.000.000	Kedungpoh	
15	Pengadaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	1	3	5.000.000	Kedungpoh	
16	Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	1	3	2.000.000	Kedungpoh	
17	Honor Kader Posbindu	5	3	1.825.000	Kedungpoh	
18	Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	1	3	3.000.000	Kedungpoh	
19	Insentif kader kesehatan/KB	23	3	13.945.000	Kedungpoh	
20	Stimulan Jamban Sehat	10	3	40.000.000	Kedungpoh	
21	Cor Rabat Beton	1	9,15	50.000.000	Klayar	
22	Cor Rabat Beton	1	9,15	50.000.000	Gentungan	
23	Cor Rabat beton	1	9,15	190.000.000	Kedungpoh Kidul	
24	Talud badan Jalan	1	9,15	100.000.000	kedungpoh kulon	
25	Drainase	1	9,15	100.000.000	Kedungpohlor	
26	Talud drainase rt 01	1	9,15	50.000.000	Nglorog	
27	Cor Rabat Beton Mojosari	1	9,15	50.000.000	Mojosari	
28	Talud kedungpoh tengah	1	9,15	50.000.000	Kedungpoh Tengah	
29	Talut Sinom	1	9,15	50.000.000	Sinom	
30	Talut Badan jalan Parengan	1	9,15	50.000.000	Gojo	
31	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	2	10	10.000.000	Kedungpoh	
32	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1	18	3.000.000	Kedungpoh	
33	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	1	18	2.000.000	Kedungpoh	
34	Peningkatan Kapasitas Pengelola Wisata Milik Desa	1	9,17	3.000.000	Kedungpoh	
	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN			67.600.000		
1	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	1	18	7.500.000	Kedungpoh	
2	Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	1	18	1.000.000	Kedungpoh	
3	Pelatihan Karawitan	1	9	5.000.000	Kedungpoh	
4	Pelatihan Tari	1	9	5.000.000	Kedungpoh	
5	Pelatihan Reog/Jathilan	1	9	5.000.000	Kedungpoh	
6	Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)	1	9	3.000.000	Kedungpoh	
7	Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	1	3	3.000.000	Kedungpoh	
8	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	1	16	16.000.000	Kedungpoh	
9	Pelaksanaan peringatan hari besar nasional	1	18	5.000.000	Kedungpoh	
10	Operasional Karang Taruna	1	18	2.500.000	Kedungpoh	

11	Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	24	18	3.600.000	Kedungpoh	
12	Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)	1	18	3.000.000	Kedungpoh	
13	Operasional LPMD dan/atau LPMP	1	18	4.000.000	Kedungpoh	
14	Operasional PKK	1	18	4.000.000	Kedungpoh	
	BIDANG PEMBERDAYAAN			374.500.000		
1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)		12	100.000.000	Kedungpoh	
2	Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)		12	90.000.000	Kedungpoh	
3	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)		12	100.000.000	Kedungpoh	
4	Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	1	12	3.000.000	Kedungpoh	
5	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	1	18	3.500.000	Kedungpoh	
6	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	1	10	2.000.000	Kedungpoh	
7	Pengiriman kelompok dalam promosi/pameran produk usaha masyarakat di tingkat Kecamatan/Daerah/Nasional	1	9	5.000.000	Kedungpoh	
8	Penyelenggaraan pameran pembangunan/promosi produk usaha masyarakat tingkat desa	3	9	15.000.000	Kedungpoh	
9	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	1	9,17	3.000.000	Kedungpoh	
10	Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	2	9,17	50.000.000	Kedungpoh	
11	Pembinaan UMKM	1	9,17	3.000.000	Kedungpoh	
	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA			30.000.000		
1	Kegiatan Penanggulangan Bencana	1	11	3.000.000	Kedungpoh	
2	Penanganan Keadaan Darurat	1	11	3.000.000	Kedungpoh	
3	Penanganan Keadaan Mendesak	1	11	24.000.000	Kedungpoh	
				2.676.377.755		



**LURAH KEDUNGPOH KAPANEWON NGLIPAR
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

KEPUTUSAN LURAH KEDUNGPOH

NOMOR : 41/KPTS/2026

TENTANG

**TIM PENYUSUN DOKUMEN RENCANA KERJA PEMERINTAH
KALURAHAN KEDUNGPOH TAHUN 2027**

LURAH KEDUNGPOH,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Kedungpoh Tahun 2027, telah terbentuk Tim penyusun dokumen tersebut;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah kedungpoh tentang Tim Penyusun Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Kedungpoh Tahun 2027;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36);
5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2023 tentang Reformasi Kalurahan Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 40);
6. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 60 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kalurahan (Berida Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 Nomor 61);
7. Peraturan Kalurahan Kedungpoh Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Kedungpoh Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Kalurahan Kedungpoh Tahun 2025 Nomor 5);
8. Peraturan Kalurahan Kedungpoh Nomor 8 Tahun 2025 tentang Daftar Kewenangan Kalurahan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan (Lembaran Kalurahan Kedungpoh Tahun 2025 Nomor 8);
9. Peraturan Kalurahan Kedungpoh Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Kedungpoh Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Kalurahan Kedungpoh Tahun 2025 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Kedungpoh Tahun 2026, dengan susunan dan personalia sebagaimana dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun bertanggungjawab kepada Lurah Kedungpoh.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, Kalurahan kedungpoh Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kedungpoh
pada tanggal 24 Juli 2026

A Lurah Kedungpoh,


DWIYONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH KEDUNGPOH
NOMOR 41/KPTS/2026
TENTANG
TIM PENYUSUN DOKUMEN RENCANA
KERJA PEMERINTAH KALURAHAN
KEDUNGPOH TAHUN 2027

SUSUNAN PERSONALIA

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Dwiyono	Lurah	Penanggungjawab
2	Ruslan Mudzakir	Carik	Ketua
3	Susilo	LPMK	Sekretaris
4	Didik Purnomo	Ulu-Ulu	Anggota
5	Priyanto	Jagabaya	Anggota
6	Kolib Nurrudin	Tatalaksana	Anggota
7	Yusuf Efendi	Danarta	Anggota
8	Nuri Handoko	Kamituwa	Anggota
9	Pujiyanto	Pangripta	Anggota
10	Pujiyati	KPM	Anggota
11	Ani Rohmawati	PKK	Anggota

Kedungpoh, 24 Juli 2026
A LURAH,


DWIYONO

**BERITA ACARA HASIL KEPUTUSAN
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KALURAHAN
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP- KALURAHAN KEDUNGPOH
TAHUN 2027**

Dalam rangka Perencanaan pembangunan Kalurahan Tahun Anggaran 2027 di Kalurahan Kedungpoh, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul, DIY maka pada:

Hari dan Tanggal : Kamis, 27 Agustus 2026
J a m : dari pukul 09.00 s.d. pukul 12.00 WIB
Tempat : Balai Kalurahan Kedungpoh

Telah diselenggarakan pertemuan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan dalam rangka Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Kedungpoh tahun anggaran 2027 yang dihadiri oleh wakil-wakil dari masyarakat serta unsur lain yang terkait dengan perencanaan pembangunan sebagaimana tercantum dalam lampiran daftar hadir.

Materi atau topik yang dibahas dalam forum ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan nara sumber adalah :

A. Materi Bahasan

Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Kalurahan ini antara lain:

1. Rancangan RKPKalurahan Tahun 2027 yang berisi program prioritas; dan
2. Rancangan DURKPKalurahan meliputi usulan kegiatan yang dibiayai APBD Kabupaten, APBD DIY, APBN dan Dana Keistimewaan.

B. Unsur Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pimpinan Musyawarah	: Susilo	dari Ketua LPMK
Sekretaris / Notulis	: Didik Purnomo	dari Pamong
Narasumber	: 1. Dwiyono,	dari Lurah
	2. Sugiyo, S.I.P.	dari Jawatan Praja Kapanewon Nglipar

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi bahasan sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya seluruh peserta musyawarah dalam rangka perencanaan pembangunan Kalurahan memutuskan dan menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari musrenbang ini, yaitu :

1. Menyepakati program prioritas dalam rancangan RKPKal kedungpoh Tahun 2027

2. Menyepakati Rancangan DURKP Kalurahan kedungpoh tahun 2028 meliputi usulan kegiatan yang dibiayai APBD Kabupaten, APBD DIY, APBN dan Dana Keistimewaan tahun 2029.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kedungpoh, 27 Agustus 2026

Pimpinan Musrenbang,


SUSILO

Lurah Kedungpoh,

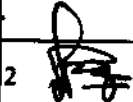
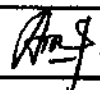
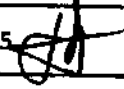
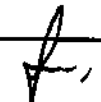
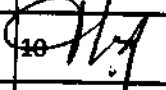
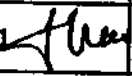
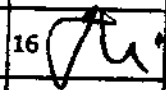
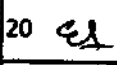
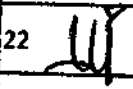


Wakil Masyarakat,


PRAPTO SEDIYONO

Daftar Hadir
Musyawarah Rencana Pembangunan Kalurahan Tahun 2026

Hari : Kamis
Tanggal : 27 Agustus 2026
Tempat : Balai Desa Kedungpoh

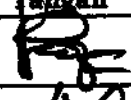
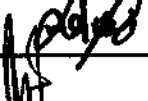
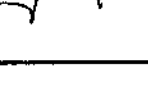
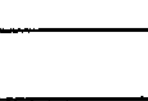
No	Nama	Alamat	Jabatan/ Unsur dari	Tanda Tangan	
1	Duren Russi	Nglorog	KIM	1	
2	Sutejo	Kep kidul	Dukuh	2	
3	SUKARTI	Kdp kulon	DUKUH	3	
4	Wahono	Kdp TENGGH	Lmp	4	
5	Ragnem	Kdp kulon		5	
6	Sugiyanto	Kdp kidul	KT	6	
7	Linda Agustina	Gentungan	KPM	7	
8	Tukiran	Nglim	Bundusan B	8	
9	Perjiman	Klayar	Wk. Pamuk	9	
10	Alvin koraan	Kegay	Karsel	10	
11	Tugiyanto	Mogulori		11	
12	Ulan G	Nglim	Dukan	12	
13	Ruray O	Klayar	Coorutan	13	
14	Faida wahyu	Kdp kidul	Kader	14	
15	Yuna	Kdp lar	Pmoxika	15	
16	Heilvan .Z.	Kdp. lar	Bawren	16	
17	Sudinono	Sinom	LPIMP	17	
18	Indra	AKB Nglim	PLKB	18	
19	Burui	Nglim	PLKB	19	
20	Eti Lestiyowati	Cojo	KUB nglim	20	
21	SRI wahyuni	Kedungpoh kulon	Kader	21	
22	Suratmi	Sinom	Kader	22	
23	Tripto	dp fugal	Donstel	23	

24	Tubman	Dep Tengah	RW		24	I
25	Septenna	SINOM	Dukuh	25	25	
26	Sutimi	GOJO	Wakil		26	
27	Sri Murni	GOJO	Dukuh	27	27	
28	Fikri	Nglorog	Wakil		28	
29	Joko S	GOJO	- - -	29	29	
30	TANZILUL	NGLOROG	WAKIL		30	
31	Mugijana	Kedungpoh	Kel Detabol	31	31	
32	Rudi Kuska	Kor. Kuba	Banuskal		32	
33	Jugyo	Kep. Ngipar	Praj.	33	33	
34	Sumarno	Banuskal	Pajun		34	
35	Yusuf E	SINOM	Amarti	35	35	
36	Didik W	KOTAMRI	Babinsa		36	
37	Kyo S	K. Laya.	Dukuh	37	37	
38	Purjati	Kedungpoh	KPM		38	
39	Tri onis	Kep	Blg	39	39	
40	Kasnarwaga	Ngipar	PD		40	
41	Didik Murni	Ngipar	PD	41	41	
42	Ashari	Purshes m. r	PD		42	
43	Joko S.	Kep. Tange	Dukuh	43	43	
44	Reyanawati P	SINOM	PKK		44	
45	Tri Wadruan	Kep Lor	Kader	45	45	
46	Dwi Yoto	Kep Kider	Lra		46	
47	Tri Astuti	GOJO	Banuskal	47	47	
48	Muri Handoko	Magorani	Banuskal		48	
49	Susilo	Magorani	LPMK	49	49	
50	Purjati	Kor Kuba	Pamijato		50	

51	Istra M	Kdp Kulon	Staf	51	44
52	Rosadilla R	Kep Benga	Staf	52	JH
53	Adi	Ngipak	Pendamping	53	Finis
54	Rahar	Bengas	Idin	54	Red
55	Kolib N	Kdp Teyd		55	
56	A Wanso	Ngipar	Shaton	56	Wu
57	Ruslan M.	Op kor.	Carik	57	
58				58	
59				59	
60				60	
61				61	
62				62	
63				63	
64				64	
65				65	
66				66	
67				67	
68				68	
69				69	
70				70	
71				71	
72				72	
73				73	
74				74	
75				75	
76				76	
77				77	

78					78
79				79	
80					80
81				81	
82					82
83				83	
84					84
85				85	
86					86
87				87	
88					88
89				89	
90					90
91				91	
92					92
93				93	
94					94
95				95	
96					96
97				97	
98					98
99				99	
100					100

Daftar Hadir Kelompok
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

No	Nama	Alamat	Jabatan kelompok	Tanda Tangan	No
1	Sulejo	Kay kidul	Ketua		1
2	SA wahyuni	Kelompok Kaban	Sekretaris		2
3	Priyanto	Kd Lor	Anggota		3
4	Suprieman	SINOM	Anggota		4
5	TR M's	Kdp Lor	Anggota		5
6	Tyo S	Klayar	Anggota		6
7	Joko S	Kdp Tenge	Anggota		7
8			Anggota		8
9			Anggota		9
10			Anggota		10
11			Anggota		11
12			Anggota		12
13			Anggota		13
14			Anggota		14
15			Anggota		15
16			Anggota		16
17			Anggota		17
18			Anggota		18
19			Anggota		19
20			Anggota		20

Ketua Kelompok,


SULEJO

KALURAHAN : KEDUNGPOH
KAPANEWON : NGLIPAR
KABUPATEN : GUNUNGKIDUL
PROVINSI : DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Hasil Pembahasan Kelompok Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan metode Scoring

No	JENIS KEGIATAN	LOKASI	PEMENUHAN KEBUTUHAN ORANG BANYAK	DUKUNGAN PNINGKTAN PNDAPATAN MASYRKAT	DUKUNGAN POTENSI MENGATASI MASALAH	JUMLAH NILAI	PERINGKAT TINDAKAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Kedungpoh					
2		Kedungpoh					
3		Kedungpoh					
4		Kedungpoh					
5		Kedungpoh					
6		Kedungpoh					
7		Kedungpoh					
8		Kedungpoh					
9		Kedungpoh					
10		Kedungpoh					
11		Kedungpoh					
12		Kedungpoh					
13		Kedungpoh					
14		Kedungpoh					
15		Kedungpoh					
		kedungpoh					
16	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Kedungpoh	7 ⁸	5 ⁷	7 ⁸	15	4
17	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	Kedungpoh	6	5	6	17	6.
18	Pengadaan Peralatan Kerja	Kedungpoh	9	6	9	25	1
19	Pengadaan Mebel	Kedungpoh	8	5	6	19	3
20		Kedungpoh					
21		Kedungpoh					

22	Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	Kedungpoh	8	4	8	20	2
23		Kedungpoh					
24		Kedungpoh					
		Kedungpoh					
25		Kedungpoh					
26		Kedungpoh					
		Kedungpoh					
27		Kedungpoh					
28		Kedungpoh					
		Kedungpoh					
29		Kedungpoh					
30		Kedungpoh					
31		Kedungpoh					
32		Kedungpoh					
33		Kedungpoh					
34		Kedungpoh					
35		Kedungpoh					
36		Kedungpoh					
37		Kedungpoh					
38		Kedungpoh					
39		Kedungpoh					
40		Kedungpoh					
41		Kedungpoh					
42		Kedungpoh					
43	Operasional KIM	Kedungpoh	6	4	8	18	5
44		Kedungpoh					
45		Kedungpoh					
46		Kedungpoh					

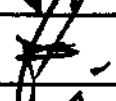
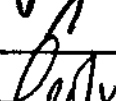
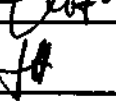
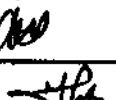
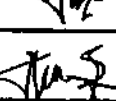
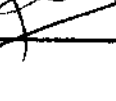
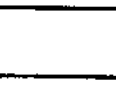
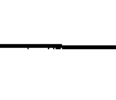
Ketua Kelompok


Sulejo

Sekretaris Kelompok


Sri Wahyuni

Daftar Hadir Kelompok **Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa**

Nama	Alamat	Jabatan kelompok	Tanda Tangan	No
SUKARTI	KRP Keden	Ketua		1
Joko	Gon	Sekretaris		2
Wahid	KRP TANJUNGPINANG	Anggota		3
Rugiyanto	KRP Sidul	Anggota		4
SUKARTI	KRP. Kuden	Anggota		5
TANZILUL	KULOREG	Anggota		6
Indira	PKB Nglipa	Anggota		7
Dusnu	PKB Nglipai	Anggota		8
Junta	KRP. Lor pud	Anggota		9
Tugiyanto	Mesasan	Anggota		10
Syidiyo	Sinom	Anggota		11
Asihari	prokuro	Anggota		12
		Anggota		13
		Anggota		14
		Anggota		15
		Anggota		16
		Anggota		17
		Anggota		18
		Anggota		19
		Anggota		20

Ketua Kelompok,


 SUKARTI

KALURAHAN : KEDUNGPOL
 KAPANEWON : NGLIPAR
 KABUPATEN : GUNUNGKIDUL
 PROVINSI : DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Hasil Pembahasan Kelompok Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dengan metode Scoring

No	JENIS KEGIATAN	LOKASI	PEMENUHAN KEBUTUHAN ORANG BANYAK	DUKUNGAN PNINGKTAN PNDAPATAN MASYRKAT	DUKUNGAN POTENSI MENGATASI MASALAH	JUMLAH NILAI	PERINGKAT TINDAKAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Kedungpoh					
2	Insentif Guru TPA	Kedungpoh	5	3	3	11	5
3	Pelatihan/Pembinaan Guru TPA	Kedungpoh	3	3	3	9	6
4	Pemeliharaan Gamelan	Kedungpoh	5	3	3	11	5
5		Kedungpoh					
6		Kedungpoh					
7	PMT Lansia	Kedungpoh	6	3	6	15	4
8	Operasional Posyandu	Kedungpoh	6	3	6	15	4
9		Kedungpoh					
10	Peningkatan Kapasitas	Kedungpoh	3	3	3	9	6
11	Edukasi Gizi Dais	Kedungpoh	3	3	3	9	6
12	Penyuluhan Kampung	Kedungpoh	3	3	3	9	6
13	Penyuluhan Ibu Hamil	Kedungpoh	3	3	3	9	6
14		Kedungpoh					
15		Kedungpoh					
16	Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	Kedungpoh	6	3	6	15	4
17		Kedungpoh					
18	Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Gernas)	Kedungpoh	3	3	3	9	6
19	Pemberian Stimulan Ja	Kedungpoh					
20		Kedungpoh					
21	Cor rabat Beton gentur	Kedungpoh	2	2	2	6	7
22	Cor Rabat Beton klayar	Kedungpoh	2	2	2	6	7
23	Cor Rabat Beton Kedur	Kidul	7	7	7	21	2
24	Talud badan Jalan Gojo	Kidul	9	9	9	27	1
25	Talud badan Jalan Nglorog	Kulon	9	8	9	26	2
25	Drainase Kedungpoh lor	kedungpoh kulon	3	3	3	9	7
26	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	Kedungpoh or	5	5	5	15	4
		Kedungpoh lor					

1
2

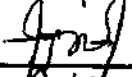
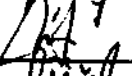
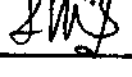
3

27	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	Kedungpoh Tengah	8	5	7	25	3
28	Peningkatan Kapasitas Pengelola Wisata Milik Desa	kedungpoh Tengah	8	5	8	20	4

Ketua Kelompok

Sekretaris Kelompok

Daftar Hadir Kelompok
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Nama	Alamat	Jabatan kelompok	Tanda Tangan
Tubiman	Korh Tengah	Ketua	
Hayawati p	Sinon	Sekretaris	
Tri Wiktani	Kel 101	Anggota	
		Anggota	
		Anggota	
Suratmi	Sinon	Anggota	
SPRI MURJANI	Bojo	Anggota	
Fariha wahyu .n	Kedungoh Kidu	Anggota	
Linda Agustina	Gentungan	Anggota	
		Anggota	
		Anggota	
		Anggota	
		Anggota	
		Anggota	
		Anggota	
		Anggota	
		Anggota	
		Anggota	
		Anggota	
		Anggota	

Ketua Kelompok,



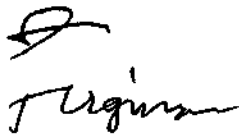
.....
Tubiman

KALURAHAN : KEDUNGPOH
KAPANEWON : NGLIPAR
KABUPATEN : GUNUNGKIDUL
PROVINSI : DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Hasil Pembahasan Kelompok Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa dengan metode Scoring

No	JENIS KEGIATAN	LOKASI	PEMENUHAN KEBUTUHAN ORANG BANYAK	DUKUNGAN PNINGKTAN PNDAPATAN MASYRKAT	DUKUNGAN POTENSI MENGATASI MASALAH	JUMLAH NILAI	PERINGKAT TINDAKAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Kedungpoh					
2		Kedungpoh					
3	Pemberian stimulan kegiatan keagamaan (Pengajian Kalurahan)	Kedungpoh	7	8	8	23	3
4	Pengajian Instansi	Kedungpoh					
5	Pelatihan Sesorah/Pidato Bahasa Jawa Dais	Kedungpoh	9	9	9	27	1
6	Pelatihan kelompok seni jathil Kedungpoh tengah	Kedungpoh	6	6	7	19	7
7	Pelatihan Kelompok seni Karawitan Kedungpoh kulon	Kedungpoh	6	7	6	19	5
8	Pelatihan kelompok seni reog Mojosari	Kedungpoh	6	6	7	19	6
9	Pelatihan kelompok seni tari Kedungpoh lor	Kedungpoh	7	6	6	19	4
10	Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)	Kedungpoh	8	8	8	24	2
11		Kedungpoh					
12		Kedungpoh					
13		Kedungpoh					
14		Kedungpoh					
15		Kedungpoh					
16		Kedungpoh					

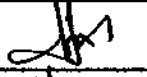
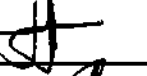
Ketua Kelompok



Sekretaris Kelompok


Linda Agustina.

Daftar Hadir Kelompok
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

No	Nama	Alamat	Jabatan kelompok	Tanda Tangan
1	Muji	Kedungoh Lor	Ketua	
2	Surtini	Gogo	Sekretaris	
3	Sarjiniem	Kedungoh Kulon	Anggota	
4	Guroyo	Klanyar	Anggota	
5	Pikn	Nglorok	Anggota	
6			Anggota	
7			Anggota	
8			Anggota	
9			Anggota	
10			Anggota	
11			Anggota	
12			Anggota	
13			Anggota	
14			Anggota	
15			Anggota	
16			Anggota	
17			Anggota	
18			Anggota	
19			Anggota	
20			Anggota	

Ketua Kelompok


.....
MUJIYANA

KALURAHAN : KEDUNGPOH
KAPANEWON : NGLIPAR
KABUPATEN : GUNUNGKIDUL
PROVINSI : DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Hasil Pembahasan Kelompok Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan metode Scoring

No	JENIS KEGIATAN	LOKASI	PEMENUHAN KEBUTUHAN ORANG BANYAK	DUKUNGAN PNINGKTAN PNDAPATAN MASYRKAT	DUKUNGAN POTENSI MENGATASI MASALAH	JUMLAH NILAI	PERINGKAT TINDAKAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	Kedungpoh	5	7	7	19	4
2	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Kedungpoh	6	3	7	16	6
3	Peningkatan Kapasitas BPD	Kedungpoh	3	4	5	12	7
1 4	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	Taman Desa	8	7	8	23	1
2 5	Pengiriman kelompok dalam promosi/pameran produk usaha masyarakat di tingkat Kecamatan/Daerah/Nasional	Kedungpoh	7	7	8	22	2
3 6	Penyelenggaraan pameran pembangunan/promosi produk usaha masyarakat tingkat desa	Kedungpoh	6	7	6	19	3
7		Kedungpoh					
8	Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	Kedungpoh	5	6	6	17	5

Ketua Kelompok

Mugiana

Sekretaris Kelompok

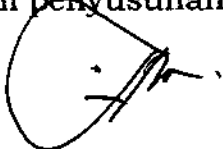
Surfui

FORMAT III.1 PROYEKSI PENDAPATAN KALURAHAN
 PROYEKSI PENDAPATAN ASLI KALURAHAN, PAGU INDIKATIF KELOMPOK
 TRANSFER, DAN PENDAPATAN LAIN- LAIN TAHUN 2027

KALURAHAN : KEDUNGPOH
 KAPANEWON : NGLIPAR
 KABUPATEN : GUNUNGKIDUL
 PROVINSI : DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

No	Uraian	Jumlah Dana (Rp)	Ket
I	Pendapatan Asli Desa (PADes)	45.642.000	
A	Hasil Usaha Desa;	7.243.000	
B	Nasil Pengelolaan Aset Desa;	10.625.000	
C	Swadaya, Partisipasi, dan gotong-royong;		
D	Lain-lain Pendapatan Asli Desa	27.774.000	
II	Kelompok Dana Transfer	1.475.262.800	
A	Dana Desa (APBN)	373.456.000	
B	Alokasi Dana Desa (bagian dana perimbangan kabupaten)	864.708.500	
C	Dana bagian dari hasil pajak dan retribusi	117.098.300	
D	Bantuan Keuangan	120.000.000	
	1. APBD Provinsi	120.000.000	
	2. APBD Kabupaten		
III	Pendapatan Lain-lain	18.000.000	
	1. Hibah	16.000.000	
	2. Sumbangan Pihak ke tiga		
	3. Bunga Bank	2.000.000	
	Total Dana (Rp)	1.538.904.800	

Kedungpoh, 2026
 Ketua tim penyusunan RKP Kalurahan



Ruslan Mudzakir

**III.3 DAFTAR RENCANA KEGIATAN HASIL PENCERMATAN RPJM KALURAHAN
KALURAHAN KEDUNGPOH, KAPANEWON NGLIPAR TAHUN 2027**

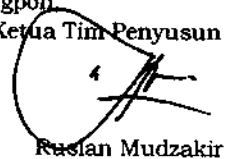
KALURAHAN : KEDUNGPOH
KAPANEWON : NGLIPAR
KABUPATEN : GUNUNGKIDUL
PROVINSI : DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

No	Bidang Kegiatan	Volume	Perkiraan Pagu Dana (Rp.)	Lokasi/ Padukuhan	Mendukung SDGs ke-	Keterangan
	2	3	4	5	6	7
A	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		1.193.743.755			
1	Penghasilan Tetap Kepala Desa	12	44.040.000	Kedungpoh	18	
2	Tunjangan Hari Raya Kepala Desa	1	3.670.000	Kedungpoh	18	
3	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	228	573.964.200	Kedungpoh	18	
4	Tunjangan Hari Raya Perangkat Desa	19	47.830.350	Kedungpoh	18	
5	BPJS Ketenagakerjaan Lurah	12	2.748.096	Kedungpoh	18	
6	BPJS Kesehatan Pamong Kalurahan	24	2.241.768	Kedungpoh	18	
7	BPJS Ketenagakerjaan Pamong Kalurahan	228	35.815.368	Kedungpoh	18	
8	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	1	121.347.278	Kedungpoh	18	
9	Tunjangan BPD	108	61.047.780	Kedungpoh	18	
10	Tunjangan Hari Raya BPD	9	4.650.000	Kedungpoh	18	
11	BPJS Ketenagakerjaan BPD	108	597.780	Kedungpoh	18	
12	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	1	6.580.775	Kedungpoh	18	
13	Insentif RT/RW	696	27.000.000	Kedungpoh	18	
14	BPJS Ketenagakerjaan RT/RW	696	3.852.360	Kedungpoh	18	
15	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	1	10.935.000	Kedungpoh	18	
16	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	1	5.000.000	Kedungpoh	18	
17	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	1	5.000.000	Kedungpoh	18	
18	Pengadaan Peralatan Kerja	2	5.000.000	Kedungpoh	18	
19	Pengadaan Mebel	1	8.500.000		18	
20	Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Mebel	1	3.912.000	Kedungpoh	18	
21	Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	2	4.700.000	Kedungpoh	18	
22	Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	1	6.500.000	Kedungpoh	18	
23	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	1	2.000.000	Kedungpoh	8, 18	
24	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	1	1.000.000	Kedungpoh	10	
25	Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	1	2.000.000	Kedungpoh	18	
26	Pemutakhiran data DTKS	1	4.000.000	Kedungpoh	10,16	
27	Penyusunan Monografi Desa	1	1.000.000	Kedungpoh	8, 18	
28	Pemutakhiran data Indeks Desa	1	3.493.000	Kedungpoh	8, 18	
29	Musyawarah Kalurahan	2	3.075.000	Kedungpoh	18	
30	Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan	2	3.075.000	Kedungpoh	18	
31	Musyawarah Kalurahan Penetapan APBKal	1	1.025.000	Kedungpoh	18	
32	Musyawarah Khusus	5	2.000.000	Kedungpoh	18	
33	Musyawarah Khusus Penetapan KPM BLT	1	3.000.000	Kedungpoh	11	
34	Penyusunan RKPKal	1	11.465.000	Kedungpoh	18	
35	Penyusunan RKPKal Perubahan	1	1.250.000	Kedungpoh	18	
36	Penyusunan APBKal	1	2.000.000	Kedungpoh	18	
37	Penyusunan APBKal Perubahan	1	1.000.000	Kedungpoh	18	
38	Penyusunan Perubahan Penjabaran APBKal	1	1.250.000		18	
39	Penyusunan Laporan Realisasi APBKal	1	1.000.000	Kedungpoh	18	
40	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	1	4.240.000	Kedungpoh	18	
41	Penyusunan Perkal Pengelolaan Aset Kalurahan	1	1.300.000	Kedungpoh	18	
42	Penyusunan Perkal Pungutan Kalurahan	1	3.000.000	Kedungpoh	18	
43	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1	3.753.000	Kedungpoh	18	

44	Pengembangan Sistem Informasi Desa (Ops)	1	4.500.000	Kedungpoh	9	
45	honor admin sinkal	4	600.000	Kedungpoh	18	
46	Operasional KIM	1	4.815.000	Kedungpoh	17, 18	
47	Dukungan dan sosialisasi pelaksanaan pilkada	1	80.000.000	Kedungpoh	18	
48	Dukungan dan sosialisasi pelaksanaan pemilihan Bamuskal	1	15.000.000	Kedungpoh	18	
49	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	14	4.220.000	Kedungpoh	18	
50	Pengisian Staf	1	25.000.000	Kedungpoh	18	
51	Tunjangan Purna Tugas BPD	9	13.950.000	Kedungpoh	18	
52	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	2	3.000.000	Kedungpoh	18	
53	Pajak Tanah Kas Kalurahan	1	1.800.000	Kedungpoh	18	
B	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		370.648.002			
1	Insentif Guru PAUD	300	72.300.000	Kedungpoh	3	
2	Insentif Guru TPA	70	21.200.000	Kedungpoh	3	
3	Pelatihan/Pembinaan Guru TPA	12	1.103.000	Kedungpoh	3	
4	Pemeliharaan Gamelan	5	8.000.000	Kedungpoh	9	
5	Honor kader Posyandu Balita	50	30.000.000	Kedungpoh	3	
6	Honor kader Posyandu Lansia	50	30.000.000	Kedungpoh	3	
7	PMT Lansia	1	6.000.000	Kedungpoh	3	
8	Operasional Posyandu	1	5.100.000	Kedungpoh	3	
9	Honor kader ILP	1	3.600.000	Kedungpoh	3	
10	Peningkatan Kapasitas Kader Yandu Balita D	1	4.380.000	Kedungpoh	3	
11	Edukasi Gizi Dais	1	4.380.000	Kedungpoh	3	
12	Penyuluhan Kampung KB	1	3.550.000	Kedungpoh	3	
13	Penyuluhan Ibu Hamil	1	1.050.000	Kedungpoh	3	
14	Operasional Kalurahan Siaga	1	8.500.000	Kedungpoh	3	
15	Operasional RDS	1	6.450.000	Kedungpoh	3	
16	Operasional TPPS	1	2.240.000		3	
17	Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	1	2.000.000	Kedungpoh	3	
18	Honor Kader Posbindu	5	1.825.000	Kedungpoh	3	
19	Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	1	2.575.000	Kedungpoh	3	
20	Pemberian Stimulan Jamban Sehat	1	5.400.000	Kedungpoh	3	
21	Insentif kader kesehatan/KB	23	12.000.000	Kedungpoh	3	
22	Talut Badan Jalan rt 1	1	20.000.000	kedungpoh kulon	9,15	
23	Cor Rabat Beton klayar	1	19.942.501	klayar	9,15	
24	Cor Rabat Beton Kedungpoh Kidul	1	19.942.501	Kedungpoh Kidul	9,15	
25	Talud badan Jalan Gojo	1	20.000.000	kedungpoh kulon	9,15	
26	Talud badan Jalan Nglorog	1	20.000.000	kedungpoh kulon	9,15	
27	Drainase Kedungpoh lor	1	20.000.000	Kedungpohlor	9,15	
28	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	2	10.000.000	Kedungpoh	10	
29	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1	3.000.000	Kedungpoh	18	
30	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	1	3.710.000	Kedungpoh	18	
31	Peningkatan Kapasitas Pengelola Wisata Milik Desa	1	2.400.000	Kedungpoh	9,17	
C	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		58.210.000			
1	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	1	7.000.000	Kedungpoh	18	
2	Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	1	2.000.000	Kedungpoh	18	
3	Pemberian stimulan kegiatan keagamaan (Pengajian Kalurahan)	1	3.000.000	Kedungpoh	4	
4	Pengajian Instansi	1	1.000.000		4	
5	Pelatihan Sesorah/Pidato Bahasa Jawa Dais	1	6.575.000		4	
6	Pelatihan kelompok seni jathil Kedungpoh ter	1	4.000.000	Kedungpoh	4	
7	Pelatihan Kelompok seni Karawitan Kedungpoh kulon	1	4.000.000		4	
8	Pelatihan kelompok seni reog Mojosari	1	4.000.000		4	
9	Pelatihan kelompok seni tari Kedungpoh lor	1	4.000.000		4	

10	Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)	1	3.000.000	Kedungpoh	16	
11	Pelaksanaan peringatan hari besar nasional	1	2.710.000	Kedungpoh	18	
12	Operasional Karang Taruna	1	2.500.000	Kedungpoh	18	
13	Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	24	3.600.000	Kedungpoh	18	
14	Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)	1	2.825.000	Kedungpoh	18	
15	Operasional LPMD dan/atau LPMP	1	4.000.000	Kedungpoh	18	
16	Operasional PKK	1	4.000.000	Kedungpoh	18	
D	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		87.220.000			
1	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	1	30.000.000	Kedungpoh	12	
2	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	1	5.270.000	Kedungpoh	18	
3	Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	1	3.000.000	Kedungpoh	18	
4	Peningkatan Kapasitas BPD	1	3.000.000	Kedungpoh	18	
5	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	1	2.000.000	Kedungpoh	10	
6	Pengiriman kelompok dalam promosi/pameran produk usaha masyarakat di tingkat Kecamatan/Daerah/Nasional	1	7.000.000	Kedungpoh	9	
7	Penyelenggaraan pameran pembangunan/promosi produk usaha masyarakat tingkat desa	3	10.000.000	Kedungpoh	9	
8	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	1	1.950.000	Kedungpoh	9,17	
9	Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	2	25.000.000	Kedungpoh	9,17	
E	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		26.300.000			
1	Kegiatan Penanggulangan Bencana	1	1.000.000	Kedungpoh	11	
2	Penanganan Keadaan Darurat	1	1.300.000	Kedungpoh	11	
3	Penanganan Keadaan Mendesak (BLT)	1	24.000.000	Kedungpoh	11	
			1.736.121.757			

Kedungpoh 2026
Ketua Tim Penyusun RKP


Ruslan Mudzakir

III.4 RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN (RKP-KALURAHAN)
TAHUN 2027

KALURAHAN : KEDUNGPOH
KAPANEWON : NGLIPAR
KABUPATEN : GUNUNGKIDUL
PROVINSI : DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

No	Bidang	Kegiatan	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun Perencanaan	Pendukung Sasaran SDGs	Lokasi	Volume	Sasaran/Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan	Ket.
										Jumlah (Rp)	Sumber Dana	Swakelola	Kerjasama Antar Kalurahan	Kerjasama Pihak Ketiga		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		1	Penghasilan Tetap Kepala Desa Tunjangan Raya	12	12	18	Kedungpoh	12	Jan - Des	43.200.000	ADD	√			Tata Laksana	
		2	Penghasilan Tetap Kepala Desa Tunjangan Raya	1	1	18	Kedungpoh	1	Mar	3.600.000	ADD	√			Tata Laksana	
		3	Penghasilan Tetap Kepala Desa Tunjangan Raya	221	228	18	Kedungpoh	228	Jan - Des	539.322.200	ADD	√			Tata Laksana	
		4	Penghasilan Tetap Kepala Desa Tunjangan Raya	18	19	18	Kedungpoh	19	Mar	41.507.600	ADD	√			Tata Laksana	
		5	Penghasilan Tetap Kepala Desa Tunjangan Raya	12	12	18	Kedungpoh	12	Jan - Des	2.695.680	ADD	√			Tata Laksana	
		6	Penghasilan Tetap Kepala Desa Tunjangan Raya	24	24	18	Kedungpoh	24	Jan - Des	2.139.864	ADD	√			Tata Laksana	
		7	Penghasilan Tetap Kepala Desa Tunjangan Raya	220	228	18	Kedungpoh	228	Jan - Des	34.444.680	ADD	√			Tata Laksana	
		8	Penghasilan Tetap Kepala Desa Tunjangan Raya	1	1	18	Kedungpoh	1	Jan - Des	100.000.000	ADD, PBH, PAD, DLL	√			Tata Laksana	
		9	Penghasilan Tetap Kepala Desa Tunjangan Raya	108	108	18	Kedungpoh	108	Jan - Des	54.600.000	ADD	√			Tata Laksana	

10	Tunjangan Hari Raya BPD	9	9	18	Kedungpoh	9	meningkatkan kualitas pemerintahan	Mar	4.650.000	ADD	✓			Tata Laksana
11	BPJS Ketenagakerjaan BPD	108	108	18	Kedungpoh	108	meningkatkan kualitas pemerintahan	Jan - Des	597.780	ADD	✓			Tata Laksana
12	Penyediaan Operasional BPD (rapat,	1	1	18	Kedungpoh	1	meningkatkan kualitas pemerintahan	Jan - Des	1.603.900	ADD, PBH, PAD, DLL	✓			Tata Laksana
13	Insentif RT/RW	696	696	18	Kedungpoh	696	meningkatkan kualitas pemerintahan	Jan - Des	27.000.000	ADD	✓			Jagabaya
14	BPJS Ketenagakerjaan	696	696	18	Kedungpoh	696	meningkatkan kualitas pemerintahan	Jan - Des	3.852.360	ADD	✓			Tata Laksana
15	Penyediaan Operasional Pemerintah	1	1	18	Kedungpoh	1	meningkatkan kualitas pemerintahan	Jan - Des	29.350.000	DDS	✓			Tata Laksana
16	Pemeliharaan Gedung/P	1	1	18	Kedungpoh	1	meningkatkan kualitas pelayanan	sept	9.000.000	PAK	✓			Tata Laksana
17	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pengadaa	1	1	18	Kedungpoh	1	meningkatkan kualitas pelayanan	Mar	5.000.000	DDS	✓			Ulu-Ulu
18	Peralatan	1	1	18	Kedungpoh	1	meningkatkan kualitas pelayanan	April	25.000.000	DDS	✓			Ulu-Ulu
19	Pengadaan Mebel	2	2	18	Kedungpoh	2	meningkatkan kualitas pelayanan	Mar	5.000.000	ADD	✓			Tata Laksana
20	Penyediaan Jasa Perbaikan	1	1	18	Kedungpoh	1	meningkatkan kualitas pelayanan	Juni	1.000.000	ADD	✓			Tata Laksana
21	Rehabilitasi/Pemeliharaan	2	2	18	Kedungpoh	2	meningkatkan kualitas pelayanan	Jan - Des	2.400.000	ADD	✓			Tata Laksana
22	Penyediaan Jasa Perbaikan	1	1	18	Kedungpoh	1	meningkatkan kualitas pelayanan	Jan - Des	6.500.000	ADD	✓			Tata Laksana

23	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran	1	1	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,17,18	Kedungpoh	1	meningkatkan kualitas data dan arsip	Juni	5.370.000	DDS	✓		Ulu-Ulu	
24	Pelayanan Administrasi Umum	1	1	18	Kedungpoh	1	meningkatkan kualitas data dan arsip	Jan - Des	1.765.800	ADD	✓		Tata Laksana	
25	Pengelolaan Administrasi	1	1	1,2,3,4,10	Kedungpoh	1	meningkatkan kualitas data dan arsip	Jan - Des	3.048.000	DDS	✓		Kamituwa	
26	Pemutakhiran data DTKS	1	1	18	Kedungpoh	1	meningkatkan kualitas data dan arsip	Des	1.000.000	ADD	✓		Jagabaya	
27	Penyusunan Monografi Desa	1	1	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,17,18	Kedungpoh	1	meningkatkan kualitas data dan arsip	Juni	10.000.000	DDS	✓		Pangripta	
28	Pemutakhiran data Indeks Desa	1	1	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,17,18	Kedungpoh	1	meningkatkan kualitas data dan arsip	April	525.000	ADD	✓		Pangripta	
29	Musyawarah Kalurahan	1	1	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,17,18	Kedungpoh	2	meningkatkan partisipasi masyarakat dalam	Juni	4.300.000	ADD	✓		Pangripta	
30	Musyawarah Perencanaan	1	1	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,17,18	Kedungpoh	2	meningkatkan partisipasi masyarakat dalam	sept	4.344.000	ADD	✓		Pangripta	
31	Pembangunan Musyawarah Kalurahan	0	1	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,17,18	Kedungpoh	1	meningkatkan partisipasi masyarakat dalam	April	2.875.000	ADD	✓		Pangripta	
32	Penetapan Musyawarah Khusus	5	5	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,17,18	Kedungpoh	5	meningkatkan partisipasi masyarakat dalam	Mei-Agust	1.050.000	ADD	✓		Pangripta	

33	Musyawarah Khusus Penetapan KPM BLT	0	1	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,17,18	Kedungpoh	1	meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan memberikan	April	3.000.000	ADD	✓				Pangripta	
34	Penyusunan RPKal	1	1	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,17,18	Kedungpoh	1	meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan memberikan	Juni - September	7.658.000	ADD	✓				Pangripta	
35	Penyusunan RPKal Perubahan	1	1	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,17,18	Kedungpoh	1	meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan memberikan	Juni	1.050.000	ADD	✓				Pangripta	
36	Penyusunan APBKal	1	1	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,17,18	Kedungpoh	1	meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan memberikan	Oktober	2.000.000	ADD	✓				Pangripta	
37	Penyusunan APBKal Perubahan	1	1	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,17,18	Kedungpoh	1	meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan memberikan	Juli - September	1.000.000	ADD	✓				Pangripta	

[illegible]

47	Dukungan dan sosialisasi pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan	14	14	18	Kedungpoh	14	meningkatkan akuntabilitas pengelolaan	Jan - Des	2.200.000	ADD	✓			Danarta
48	Dukungan dan sosialisasi pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan	20	20	18	Kedungpoh	20	meningkatkan kualitas pemerintahan	Juli	10.000.000	ADD	✓			Tata Laksana
49	Penyusunan Laporan Keuangan	1	2	9,10,16,18	Kedungpoh	2	meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan	Juli, Des	2.720.000	ADD	✓			Pangripta
50	Pengisian tunjangan Purna Tugas BPD	1	1	17,18	Kedungpoh	1	meningkatkan partisipasi masyarakat	Mar - Sept	2.000.000	ADD	✓			Jagabaya
51	Pengisian tunjangan Purna Tugas BPD	0	1	18	Kedungpoh	1	meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap kegiatan	semester I	5.000.000,00	DAIS	✓			Tata Laksana
52	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan	0	1	18	Kedungpoh	1	meningkatkan partisipasi masyarakat terkait kegiatan	triwulan III	3.600.000,00	DAIS	✓			Tata Laksana
53	Pajak Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	0	1	9,18	Kedungpoh	1	meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan	semester I	11.300.000,00	DAIS	✓			Tata Laksana
1	Insentif Guru PAUD	288	300	4	Kedungpoh	300	meningkatkan kualitas tenaga	Jan - Des	72.025.000	DDS	✓			Kamituwa
2	Insentif Guru TPA	70	70	4	Kedungpoh	70	meningkatkan kualitas tenaga	Jan - Des	21.025.000	DDS	✓			Kamituwa
3	Pelatihan/ Pembinaan Guru TPA	6	12	4	Kedungpoh	12	meningkatkan kualitas tenaga	Jan - Des	6.000.000	DDS	✓			Kamituwa
4	Pemeliharaan dan Gamelan	1	5	9,18	Kedungpoh	5	meningkatkan kualitas sdm dan	Juli	5.000.000	DDS	✓			Ulu-Ulu
5	Pelatihan Karawitan	1	1	4,9,18	Kedungpoh	1	meningkatkan kualitas sdm dan	Jan - Des	12.500.000	DDS	✓			Ulu-Ulu

6	Pelatihan Tari	1	1	4,9,18	Kedungpoh	1	meningkatkan kualitas sdm dan	Jan - Des	8.000.000	DDS	✓				Ulu-Ulu
7	Pelatihan Reog/Jathilan	1	1	4,9,18	Kedungpoh	1	meningkatkan kualitas sdm dan	Jan - Des	6.500.000	DDS	✓				Ulu-Ulu
9	Honor kader Posyandu Balita	50	50	3	Kedungpoh	50	meningkatkan kualitas kader	Mar	30.000.000	DDS	✓				Kamituwa
10	Honor kader Posyandu Lansia	50	50	3	Kedungpoh	50	meningkatkan kualitas kader	Mar	30.000.000	DDS	✓				Kamituwa
11	PMT Lansia	1	1	2,3	Kedungpoh	1	meningkatkan kualitaske	Jan - Des	6.000.000	DDS	✓				Kamituwa
12	PMT Balita	1	1	2,3	Kedungpoh	1	meningkatkan pencegahan dan	Jan - Des	13.896.000	DDS	✓				Kamituwa
13	PMT Resiko Stunting	1	1	2,3	Kedungpoh	1	meningkatkan pencegahan dan	Jan - Des	5.875.000	DDS	✓				Kamituwa
14	PMT Sasaran Stunting	1	1	2,3	Kedungpoh	1	meningkatkan pencegahan dan	Jan - Des	7.560.000	DDS	✓				Kamituwa
15	Penyuluhan Stunting	1	1	3	Kedungpoh	1	meningkatkan pencegahan dan	Mei, Okt	8.175.000	DDS	✓				Kamituwa
16	Penyuluhan Kampung KB	1	1	3	Kedungpoh	1	meningkatkan pencegahan dan	Mei, Okt	3.350.000	DDS	✓				Kamituwa
17	Penyuluhan Ibu Hamil	1	1	3	Kedungpoh	1	meningkatkan pencegahan dan	Mei, Okt	625.000	DDS	✓				Kamituwa
18	Operasional Katurahan Siaga	1	1	3,13	Kedungpoh	1	meningkatkan pencegahan dan	Jan - Des	4.000.000	DDS	✓				Kamituwa
19	Operasional RDS	1	1	3,13	Kedungpoh	1	meningkatkan pencegahan dan	Jan - des	8.000.000	DDS	✓				Kamituwa

20	Pencantrahan Sarana Prasarana Posyandu/	1	1	3	Kedungpoh	1	meningkatkan pat pencegahan dan	Oktober	2.000.000	DDS	✓	Kamituwa
21	Honor Kader Posbindu	5	5	3	Kedungpoh	5	meningkatkan pat pencegahan dan	Jan - Des	1.825.000	DDS	✓	Kamituwa
22	Gerakan Masyarakat	1	1	3	Kedungpoh	1	meningkatkan kan kualitaske	Mei	3.000.000	DDS	✓	Kamituwa
23	Festival Senam	1	1	3	Kedungpoh	1	meningkatkan kan kualitaske	Agust	5.400.000	DDS	✓	Kamituwa
24	Insentif kader kesehatan /KB	23	23	3	Kedungpoh	23	meningkatkan kan kualitas kader	Mar	13.945.000	DDS	✓	Kamituwa
25	Cor Rabat Beton	0	1	9	Klayar	1	meningkatkan kan kualitas	April	150.000.000	DDS	✓	Ulu-Ulu
26	Cor Rabat Beton	0	1	9	Kedungpohkulon	1	meningkatkan kan kualitas	April	50.000.000	DDS	✓	Ulu-Ulu
27	Cor Rabat beton	0	1	9	Kedungpoh Kidul	1	meningkatkan kan kualitas	April	190.000.000	DDS	✓	Ulu-Ulu
28	Talud badan Jalan	0	1	9	kedungpoh kulon	1	meningkatkan kan kualitas	April	100.000.000	DDS	✓	Ulu-Ulu
29	Drainase	0	1	9	Kedungpohlor	1	meningkatkan kan kualitas	April	100.000.000	DDS	✓	Ulu-Ulu
30	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan	0	10	1,8,9	Kedungpoh	2	meningkatkan kan upaya pengentasan	sept	10.000.000	DDS	✓	Kamituwa
31	Dukungan Duaker jalan lingkungan	0	1	6,9	Nglorog	1	meningkatkan kan kualitas infrastruktur	April	20.000.000	DDS	✓	Ulu-Ulu
32	Jut	1	1	6,9	kedungpoh kidul		meningkatkan kan kualitas	Juli	50.000.000	dds	✓	
33	Penyenggaraan Informasi Publik	1	1	17,18	Kedungpoh	1	meningkatkan kan partisipasi masyarakat	Jan - Des	3.000.000	DDS	✓	Tata Laksana

PEMBANG
UNAN
DESA

34	pengelolaan dan Pembuatannya Jaringan/Irigrig	0	1	9,17,18	Kedungpoh	1	meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat	sept	2.000.000	DDS	✓				Tata Laksana
35	Perencanaan Ruang Pertemuan dan Kamar	0	2	17	Kedungpoh kidul rt 01 (taman desa)	2	meningkatkan pengembangan	Juli	15.000.000	DDS	✓				Ulu-Ulu
36	pengelolaan Kapasitas Pengelola	1	1	17	Kedungpoh	1	meningkatkan pengembangan	Juli	3.000.000	DDS	✓				Ulu-Ulu
37	makanan tambahan berbasis pangan	3478	3838	2,3	Kedungpoh	1	angka stunting menurun	Jan - Des	36.000.000	DAIS	✓				Kamituwa
38	remaja sehat	0	1	3	Kedungpoh	1	kekuatan kesehatan	semester I	6.000.000	DAIS	✓				Kamituwa
39	Pelatihan ibu baduta	0	1	3	Kedungpoh	1	kekuatan kesehatan terdistribusi	semester I	3.000.000	DAIS	✓				Kamituwa
40	Pelatihan Bumil	0	1	3	Kedungpoh	1	kekuatan kesehatan terdistribusi	semester I	3.000.000	DAIS	✓				Kamituwa
41	manajemen gizi	0	1	3	Kedungpoh	1	kekuatan kesehatan terdistribusi	semester I	6.000.000	DAIS	✓				Kamituwa
42	Pelatihan pola asuh anak	0	1	3,4	Kedungpoh	1	kekuatan kesehatan terdistribusi	semester I	6.000.000	DAIS	✓				Kamituwa
43	posyandu nyawiji	1	1	3,4	Kedungpoh	1	kekuatan kesehatan terdistribusi	semester I	1.500.000	DDS	✓				Kamituwa
44	al posyandu nyawiji	1	1	3,4	Kedungpoh	1	kekuatan kesehatan terdistribusi	semester I	10.000.000	DDS	✓				Kamituwa
45	Cor Rabat Beton nglorog	0	1	9	Kedungpoh	1	meningkatkan kualitas	semester 2	50.000.000	BKK KAB	✓				Kamituwa
46	cor rabat beton gojo	0	1	9	Kedungpoh	1	meningkatkan kualitas	semester 3	50.000.000	BKK KAB	✓				Kamituwa
47	cor rabat beton klayar	0	1	9	Kedungpoh	1	meningkatkan kualitas	semester 4	50.000.000	BKK KAB	✓				Kamituwa
48	Cor rabat beton kdp kulon	0	1	9	Kedungpoh	1	meningkatkan kualitas	semester 5	50.000.000	BKK KAB	✓				Kamituwa
49	drainase mojosari	0	1	9	Kedungpoh	1	meningkatkan kualitas	semester 6	50.000.000	BKK KAB	✓				Kamituwa

50	cor rabat kedungpoh tengah	0	1	9	Kedungpoh	1	meningkatkan kualitas	semester 7	50.000.000	BKK KAB	✓			
1	PER Peningkatan & Peningkatan Kapasitas	1	1	16,18	Kedungpoh	1	meningkatkan kualitas tenaga keamananan	Nop	1.339.201.000					
2	Pembinaan kelembagaan Desa	1	1	13,15,16,18	Kedungpoh	1	meningkatkan kualitas	Nop	3.000.000	PBH	✓		Jagabaya	
3	Pembinaan Warga	1	1	16,17,18	Kedungpoh	1	meningkatkan kualitas	Mei - Sep	50.000.000	BKK DAIS	✓		Jagabaya	
4	Penyediaan stimulan kegiatan	1	1	4	Kedungpoh	1	meningkatkan kualitas	Mar	3.000.000	PBH	✓		Kamituwa	
5	Penyediaan Festival/Lomba	0	1	16	Kedungpoh	1	meningkatkan kemampuan	Juli - Sept	9.000.000	DLL	✓		Kamituwa	
6	Pembinaan Pemuda di bidang Olah Raga	0	1	16	Kedungpoh	1	meningkatkan kualitas SDM wasit untuk olah	April	5.000.000	DDS	✓		Kamituwa	
7	Pelaksanaan peringatan hari besar nasional	1	1	18	Kedungpoh	1	meningkatkan semangat nasionalisme dalam pembangu	Agust	5.000.000	PBH	✓		Jagabaya	
8	Operasional Karang Taruna	1	1	18	Kedungpoh	1	meningkatkan kualitas lembaga	Jan - Des	2.500.000	ADD	✓		Kamituwa	
9	Kader Pemberdaya	24	24	16,17,18	Kedungpoh	24	meningkatkan kualitas	Jan - Des	3.600.000	DDS	✓		Kamituwa	
10	Optimisasi peran Tim Koordinasi Penanggul	1	1	1,2,3,4,5,6,8,10,16	Kedungpoh	1	meningkatkan peran pemerintah kabupaten	Nop	3.000.000	PBH	✓		Kamituwa	
11	Operasional LPMD dan/atau LPMP	1	1	17,18	Kedungpoh	1	meningkatkan kualitas lembaga	Jan - Des	4.000.000	PBH	✓		Kamituwa	Ulu-Ulu

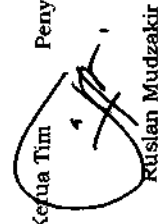
PEMBINAAN
KEMASYA
RAKATAN

	14	Penyelenggaraan pameran pembangunan nasional/promosi produk pertanian	2	3	9,12	Kedungpoh	3	meningkatkan pengembangan potensi UMKM	Jan - Des	30.000.000	DDS	✓				Ulu-Ulu
	15	Pengelolaan BUM Desa	1	1	9,12	Kedungpoh	1	meningkatkan kualitas sdm	April	3.000.000	DDS	✓				Ulu-Ulu
	16	Peningkatan Gedung	0	1	9,17	Kedungpoh	1	meningkatkan kualitas lembaga	Juli	20.000.000	DDS	✓				Ulu-Ulu
	17	Pembangunan/Rehabilitasi Pasar	0	2	8,9,12,17	Kedungpoh	2	meningkatkan pengembangan	Juli	50.000.000	DDS	✓				Ulu-Ulu
	18	Pemotifan pedagang di	0	1	8,12	Kedungpoh	1	meningkatkan pengembangan	Juli	3.000.000	DDS	✓				Ulu-Ulu
	19	Indukan ayam untuk masyarakat	0	1	1,2,10	Kedungpoh	1	meningkatkan keamanan	Juni	4.200.000	DAIS	✓				Ulu-Ulu
		Pembangunan PER								539.700.000						
	1	Kegiatan Penanggulangan Bencana	1	1	2,6,13,15	Kedungpoh	1	meningkatkan kesiapsiagaan	Jan - Des	15.000.000	DDS	✓				Jagabaya
5	2	Penanganan Keadanan Mendesak	1	1	2,6,13,15	Kedungpoh	1	meningkatkan upaya pengentasan kemiskinan	Jan - Des	61.200.000	DDS	✓				Kamituwa
		Pembangunan PER								76.200.000						
		Pembangunan RENCANA								3.111.023.864						

Mengetahui, Lurah Kedungpoh


DWIYONO

Ketua Tim Penyusun


Ruslan Mudzakir

III.5 DAFTAR USULAN RKP KALURAHAN (DURKP KALURAHAN)

DAFTAR USULAN RKP KALURAHAN (APBD KABUPATEN, APBD DIY, DAN APBN TAHUN 2028 SERTA DANA KEISTIMEWAAN 2029)

Kalurahan : KEDUNGPOH
Kapanewon : NGLIPAR
Kabupaten : GUNUNGKIDUL
Provinsi : DIY

No	Bidang/ Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Sasaran/ manfaat	Prakiraan Biaya (Rp)	Sumber Pembiayaan (APBN, APBD DIY, DAIS, APBD KAB)	Ket.
1	Pelatihan pengendalian bahaya kebakaran	Kedungpoh	1 pkt	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	35.000.000	APBD KAB	
2	Sosialisasi pengurangan risiko bencana	Kedungpoh	2 pkt	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	5.590.000	APBD KAB	
3	Pelatihan Relawan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB)	Kedungpoh	1 pkt	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	16.390.000	APBD KAB	
4	Penyediaan papan rambu informasi rawan bencana	Kedungpoh	1 pkt	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	9.114.000	APBD KAB	
5	Fasilitasi Gerakan Kali Bersih	Kedungpoh	1 pkt	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	22.500.000	APBD KAB	
6	Pendampingan TPS3R	Kedungpoh	1 pkt	Pengelolaan Sampah	72.150.000	APBD KAB	
7	Tempat sampah beroda	Kedungpoh	1 pkt	Pengelolaan sampah	3.000.000	APBD KAB	
8	Tempat sampah terpilah	Kedungpoh	2 pkt	Pengelolaan sampah	1.500.000	APBD KAB	
9	Pembangunan drainase Tipe B (Sedang)	Kedungpoh	1 pkt	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.066.878.130	APBD KAB	
10	Pembangunan Talud Jalan Tinggi 2,5 meter	Kedungpoh	1 pkt	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	6.077.561.705	APBD KAB	
11	Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)	Kedungpoh	1 pkt	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.206.000	APBD KAB	
12	Pengangkatan Sedimen Sungai	Kedungpoh	1 pkt	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	620.000.000	APBD KAB	
13	Peningkatan jaringan irigasi permukaan	Kedungpoh	1 pkt	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.169.000.000	APBD KAB	
14	Rehabilitasi Bendung Irigasi Permukaan	Kedungpoh	1 pkt	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	72.000.000	APBD KAB	
15	Rehabilitasi jalan (lebar 4 meter)	Kedungpoh	1 pkt	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.122.044.470	APBD KAB	
16	Cor Beton Jalan Kabupaten (lebar 4 meter)	Kedungpoh	1 pkt	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	2.496.941.362	APBD KAB	
17	Rekonstruksi Jalan (lebar 5 meter)	Kedungpoh	1 pkt	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	2.214.488.259	APBD KAB	
18	Pemasangan Cermin Tikung	Kedungpoh	1 pkt	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	6.000.000	APBD KAB	
19	Pemasangan Deliniator	Kedungpoh	1 pkt	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1.500.000	APBD KAB	
20	Pemasangan Marka ZoSS (Zona Selamat Sekolah)	Kedungpoh	1 pkt	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	50.000.000	APBD KAB	
21	Pemasangan Rambu F	Kedungpoh	1 pkt	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	15.000.000	APBD KAB	
22	Pemasangan Rambu Standar	Kedungpoh	1 pkt	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1.700.000	APBD KAB	
23	Pemasangan Warning Light	Kedungpoh	1 pkt	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	70.000.000	APBD KAB	
24	Kampanye gemar makan ikan di Posyandu/PAUD/TK	Kedungpoh	1 pkt	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.855.000	APBD KAB	
25	Sosialisasi pelestarian ekosistem perairan darat	Kedungpoh	1 pkt	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	4.686.000	APBD KAB	

26	Pengadaan Sarpras Olahraga Sepak Bola	Kedungpoh	1	pkt	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	8.500.000	APBD KAB	
27	Pengadaan Sarpras Olahraga Voli	Kedungpoh	1	pkt	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	8.450.000	APBD KAB	
28	Pelatihan Kewirausahaan	Kedungpoh	1	pkt	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	577.000	APBD KAB	
29	Pelatihan Manajemen Perkoperasian	Kedungpoh	1	pkt	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	590.333	APBD KAB	
30	Pelatihan Peningkatan Kualitas dan Diversifikasi produk kerajinan bambu	Kedungpoh	1	pkt	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	25.737.400	APBD KAB	
31	Pelatihan Peningkatan Kualitas Makanan Olahan Lokal	Kedungpoh	1	pkt	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan	953.750	APBD KAB	
32	Pelatihan Olahan Mocaf dan Cassava (Magang)	Kedungpoh	1	pkt	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	2.046.667	APBD KAB	
33	Bimtek keluarga sehat melalui pangan asal hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal)	Kedungpoh	1	pkt	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	5.169.000	APBD KAB	
34	Bimtek pemeliharaan ayam bagi keluarga miskin	Kedungpoh	1	pkt	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	24.190.000	APBD KAB	
35	Gerakan makan telur cegah stunting (Mantel Ceting)	Kedungpoh	1	pkt	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.580.000	APBN	
36	Pelatihan penanaman hijauan pakan ternak	Kedungpoh	1	pkt	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	6.115.000	APBD KAB	
37	Pembinaan Kerukunan Umat beragama bagi masyarakat	Kedungpoh	1	pkt	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	7.575.000	APBD KAB	
38	Deklarasi STBM 5 Pilar	Kedungpoh	1	pkt	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5.025.000	APBD KAB	
39	Fasilitasi Pencatatan dan Pelaporan Posyandu secara Digital dalam Mendukung Transformasi Pelayanan Kesehatan Primer	Kedungpoh	1	pkt	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.000.000	APBD KAB	
40	Orientasi dalam Pemantauan Pertumbuhan dan Perkembangan Balita Bagi Kader di Posyandu (Pelatihan SDIDTK)	Kedungpoh	1	pkt	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	9.205.000	APBD KAB	
41	Pelatihan Keterampilan Dasar Kader	Kedungpoh	1	pkt	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5.975.000	APBD KAB	
42	Pelatihan Pemulasaraan Jenazah Dengan Infeksi Penyakit Menular	Kedungpoh	2	pkt	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.755.000	APBD KAB	
43	Pelatihan Zoonosis (penyakit yg ditularkan oleh hewan) dan Tular Vektor / Malaria	Kedungpoh	1	pkt	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.455.000	APBD KAB	
44	Penyuluhan Kesehatan tentang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit TBC	Kedungpoh	1	pkt	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.742.500	APBD KAB	

45	Penyuluhan Kesehatan tentang Penyakit HIV AIDS dan IMS	Kedungpoh	1	pkt	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.752.500	APBD KAB	
46	Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Usia Anak	Kedungpoh	1	pkt	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5.824.500	APBD KAB	
47	Sosialisasi Legalitas Usaha Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Standar (SS), Izin Usaha Industri (IUI)	Kedungpoh	1	pkt	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (UKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	5.400.000	APBD KAB	
48	Pembukaan Jalan Baru	Kedungpoh	1	pkt	Terbangunnya Akses Jalan Baru	30.000.000	APBD DIY	
49	Cor Rabat	Kedungpoh	1	pkt	Terbangunnya Cor Rabat Jalan	100.600.000	APBD DIY	
50	Rehab Bendungan	Kedungpoh	1	pkt	Rehabilitasi Bendungan	50.000.000	APBD DIY	
51	Drainase	Kedungpoh	1	pkt	Terbangunnya Drainase Jalan	50.000.000	APBD DIY	
52	Talud	Kedungpoh	1	pkt	Terbangunnya talud Jalan	100.000.000	APBD DIY	
53	Arsitektur Gaya Yogyakarta (RTLH)	Kedungpoh	10	pkt	Rumah Tidak Layak Huni	500.000.000	APBD DIY	
54	Pelatihan game	Kedungpoh	1	pkt	Pelatihan	20.000.000	APBD DIY	
55	Gelar Budaya Jogja	Kedungpoh	1	pkt	Pentas Budaya	30.000.000	APBD DIY	
56	Jaringan Internet Untuk Padukuhan Diarea Blank Spot	Kedungpoh	1	pkt	pengadaan jaringan internet	50.000.000	APBD DIY	
57	Wifi Padukuhan	Kedungpoh	1	pkt	pengadaan wifi padukuhan	1.000.000	APBD DIY	
58	Omah Jagawarga	Kedungpoh	1	pkt	Jagawarga se kalurahan kedungpoh	75.000.000	APBD DIY	
59	Padat Karya Jogja Istimewa	Kedungpoh	1	pkt	Pembangunan JUT	1.000.000.000	APBD DIY	
60	JUT	Kedungpoh	4	pkt	JUT	100.000.000	APBD DIY	
61	Rehab Balai Padukuhan	Kedungpoh	1	pkt	Rehabilitasi Balai	75.000.000	APBD DIY	
62	Rintisan Mandiri Budaya (Desa Budaya)	Kedungpoh	1	pkt	Stimulan	750.000.000	APBD DIY	
63	Rintisan Mandiri Budaya (Desa Mandiri Pangan)	Kedungpoh	1	pkt	Stimulan	750.000.000	APBD DIY	
64	Rintisan Mandiri Budaya (Desa Preneur)	Kedungpoh	1	pkt	Stimulan	750.000.000	APBD DIY	
65	Rintisan Mandiri Budaya (Desa Prima)	Kedungpoh	1	pkt	Stimulan	750.000.000	APBD DIY	
66	Rintisan Mandiri Budaya (Desa Wisata)	Kedungpoh	1	pkt	Stimulan	500.000.000	APBD DIY	
67	Tertib Administrasi Pertanahan	Kedungpoh	1	pkt	tertib administrasi	20.000.000	APBD DIY	
68	Reformasi Birokrasi	kedungpoh	1	pkt	refkal	120.000.000	APBD DIY	

Mengetahui
Lurah Kedungpoh

Dwiyono

Kedungpoh, September 2026
Ketua Tim Penyusunan
RKP Kalurahan,


Ruslan Mudzakir

FORMAT V.2. BERITA ACARA PENYUSUNAN RANCANGAN RKP KALURAHAN

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP KALURAHAN TAHUN 2027

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RKP Kalurahan, di Kalurahan Kedungpoh, Kapanewon Nglipar Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada :

Hari dan Tanggal : Jum,at , 18 September 2026
J a m : dari pukul 20.00 s.d. selesai
Tempat : Balai Desa Kedungpoh

Telah diselesaikan penyusunan rancangan RKP Kalurahan oleh tim penyusun RKP Kalurahan sebagaimana daftar terlampir.
Materi atau topik yang dibahas dalam Forum ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah :

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan RKP Kalurahan Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1. Pencermatan Pagu Indikatif Kalurahan dan Potensi Pendapatan Kalurahan lainnya;
2. Penyelarasan Rencana Kegiatan yang Masuk ke Kalurahan;
3. Penyusunan Rancangan RKP Kalurahan Tahun 2027 dan DURKP Kalurahan
4. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan (Musrenbangkal)
5. Penyusunan Rancangan Akhir RKP Kalurahan.

Hasil kegiatan berupa rancangan RKP Kalurahan sebagaimana terlampir.
Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kedungpoh, 18 September 2026

Lurah Kedungpoh



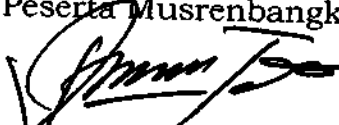
(DWIYONO)

Ketua Tim Penyusun RKP
Kalurahan



(RUSLAN MUDZAKIR)

Wakil Peserta Musrenbangkal



(PRAPTO SEDIYONO)

V.1 RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN (RKP-KALURAHAN)
TAHUN 2027

KALURAHAN : KEDUNGPOH
KAPANEWON : NGLIPAR
KABUPATEN : GUNUNGKIDUL
PROVINSI : DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

No	Bidang Kegiatan	Lokasi	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun Perencanaan	Sasaran SDGs	Volume	Sasaran/Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan			Pola Pelaksanaan				Rencana Pelaksanaan Kegiatan	Ket. / Prioritas
									Jumlah (Rp)	Sumber Dana	Swakelola	Kerjasama Antar Kalurahan	Kerjasama sama Pihak Ketiga				
1	2	3	4	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	1	Penghasilan Tetap Kepala Desa	Kedungpoh	12	12	18	meningkatkan kualitas pemerintahan kalurahan	Jan - Des	44.040.000	ADD	✓			Tata Laksana		Wajib	
	2	Tunjangan Hari Raya Kepala Desa	Kedungpoh	1	1	18	meningkatkan kualitas pemerintahan kalurahan	Mar	3.670.000	ADD	✓			Tata Laksana		Wajib	
	3	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	Kedungpoh	221	228	18	meningkatkan kualitas pemerintahan kalurahan	Jan - Des	573.964.200	ADD	✓			Tata Laksana		Wajib	
	4	Tunjangan Hari Raya Perangkat Desa	Kedungpoh	18	19	18	meningkatkan kualitas pemerintahan kalurahan	Mar	47.830.350	ADD	✓			Tata Laksana		Wajib	
	5	BPJS Ketenagakerjaan Lurah	Kedungpoh	12	12	18	meningkatkan kualitas pemerintahan kalurahan	Jan - Des	2.748.096	ADD	✓			Tata Laksana		Wajib	
	6	BPJS Kesehatan Pamong Kalurahan	Kedungpoh	24	24	18	meningkatkan kualitas pemerintahan kalurahan	Jan - Des	2.241.768	ADD	✓			Tata Laksana		Wajib	
	7	BPJS Ketenagakerjaan Pamong Kalurahan	Kedungpoh	220	228	18	meningkatkan kualitas pemerintahan kalurahan	Jan - Des	35.815.368	ADD	✓			Tata Laksana		Wajib	
	8	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	Kedungpoh	1	1	18	meningkatkan kualitas pemerintahan kalurahan	Jan - Des		ADD, PBH, PAD, DLL	✓			Tata Laksana		Wajib	
	9	Tunjangan BPD	Kedungpoh	108	108	18	meningkatkan kualitas pemerintahan kalurahan	Jan - Des	61.047.780	ADD	✓			Tata Laksana		Wajib	
	10	Tunjangan Hari Raya BPD	Kedungpoh	9	9	18	meningkatkan kualitas pemerintahan kalurahan	Mar	4.650.000	ADD	✓			Tata Laksana		Wajib	
	11	BPJS Ketenagakerjaan BPD	Kedungpoh	108	108	18	meningkatkan kualitas pemerintahan kalurahan	Jan - Des	597.780	ADD	✓			Tata Laksana		Wajib	

12	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	Kedungpoh	1	1	18	1	Is	meningkatkan kualitas pemerintah kalurahan	Jan - Des	6.580.775	ADD, PBH, PAD, DLL	✓		Tata Laksana	Wajib
13	Insentif RT/RW	Kedungpoh	696	696	18	696	ob	meningkatkan kualitas lembaga kemasyarakatan	Jan - Des	27.000.000	ADD	✓		Jagabaya	Wajib
14	BPJS Ketenagakerjaan RT/RW	Kedungpoh	696	696	18	696	ob	meningkatkan kualitas lembaga kemasyarakatan	Jan - Des	3.852.360	ADD	✓		Tata Laksana	Wajib
15	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	Kedungpoh	1	1	18	1	Is	meningkatkan kualitas pemerintah kalurahan	Jan - Des	10.935.000	DDS	✓		Tata Laksana	Wajib
16	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Kedungpoh	1	1	18	1	pkt	meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat	sept	5.000.000	PAK	✓		Ulu-Ulu	Wajib
17	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	Kedungpoh	1	1	18	1	Is	meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat	Mar	5.000.000	DDS	✓		Ulu-Ulu	Wajib
18	Pengadaan Peralatan Kerja	Kedungpoh	1	1	18	1	Is	meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat	April	5.000.000	DDS	✓		Tata Laksana	Wajib
19	Pengadaan Mebel	Kedungpoh	2	2	18	2	bh	meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat	Mar	8.500.000	ADD	✓		Tata Laksana	Wajib
20	Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Mebel	Kedungpoh	1	1	18	1	Is	meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat	Juni	3.912.000	ADD	✓		Tata Laksana	Wajib
21	Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kedungpoh	2	2	18	2	bh	meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat	Jan - Des	4.700.000	ADD	✓		Tata Laksana	Wajib
22	Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	Kedungpoh	1	1	18	1	Is	meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat	Jan - Des	6.500.000	ADD	✓		Tata Laksana	Wajib
23	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	Kedungpoh	1	1	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,17,18	1	Is	meningkatkan kualitas data dan arsip	Juni	2.000.000	DDS	✓		Ulu-Ulu	Wajib
24	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	Kedungpoh	1	1	18	1	Is	meningkatkan kualitas data dan arsip	Jan - Des	1.000.000	ADD	✓		Tata Laksana	Wajib

34	Penyusunan RPKal	Kedungpoh	1	1	1,2,3,4,5, 6,7,8,9, 10,11,12 ,13,15,1 6,17,18	1	1,2,3,4,5, 6,7,8,9, 10,11,12 ,13,15,1 6,17,18	1 pkt	meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan memberikan kepastian hukum yang bisa dipertanggungjawabkan	Juni - Sept	11.465.000	ADD	✓			Pangripta	Wajib
35	Penyusunan RPKal Perubahan	Kedungpoh	1	1	1,2,3,4,5, 6,7,8,9, 10,11,12 ,13,15,1 6,17,18	1	1,2,3,4,5, 6,7,8,9, 10,11,12 ,13,15,1 6,17,18	1 pkt	meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan memberikan kepastian hukum yang bisa dipertanggungjawabkan	Juni	1.250.000	ADD	✓			Pangripta	Wajib
36	Penyusunan APBKal	Kedungpoh	1	1	1,2,3,4,5, 6,7,8,9, 10,11,12 ,13,15,1 6,17,18	1	1,2,3,4,5, 6,7,8,9, 10,11,12 ,13,15,1 6,17,18	1 pkt	meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan memberikan kepastian hukum yang bisa dipertanggungjawabkan	Oktober	2.000.000	ADD	✓			Pangripta	Wajib
37	Penyusunan APBKal Perubahan	Kedungpoh	1	1	1,2,3,4,5, 6,7,8,9, 10,11,12 ,13,15,1 6,17,18	1	1,2,3,4,5, 6,7,8,9, 10,11,12 ,13,15,1 6,17,18	1 pkt	meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan memberikan kepastian hukum yang bisa dipertanggungjawabkan	Juli - Sept	1.000.000	ADD	✓			Pangripta	Wajib
38	Penyusunan Perubahan Perjabaran APBKal	Kedungpoh	1	1	18	1	18	1 pkt	meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan memberikan kepastian hukum yang bisa dipertanggungjawabkan	Jan	1.250.000	ADD	✓			Pangripta	Wajib
39	Penyusunan Laporan Realisasi APBKal	Kedungpoh	1	1	9,10,16,17	1	9,10,16,17	1 pkt	meningkatkan kualitas data dan pengananan aset	Jan - Des	1.000.000	ADD	✓			Pangripta	Wajib

40	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	Kedungpoh	1	1	9,10,16,18	1	1	1	1	meningkatkan pemanfaatan aset untuk pembangunan dan memberikan kepastian hukum yang bisa dipertanggungjawabkan	Oktober	4.240.000	ADD	✓			Tata Laksana	Wajib
41	Penyusunan Perkal Pengelolaan Aset Kalurahan	Kedungpoh	1	1	9,10,16,18	1	1	1	1	meningkatkan pemanfaatan aset untuk pembangunan dan memberikan kepastian hukum yang bisa dipertanggungjawabkan	Oktober	1.300.000	ADD	✓			Tata Laksana	Wajib
42	Penyusunan Perkal Pungutan Kalurahan	Kedungpoh	1	1	1,2,3,4,10	1	1	1	1	meningkatkan upaya pengentasan kemiskinan ekstrim	Des	3.000.000	ADD	✓			Tata Laksana	Wajib
43	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	Kedungpoh	1	1	16,18	1	1	1	1	meningkatkan kualitas pemerintahan kalurahan	Des	3.753.000	ADD	✓			Pangripta	Wajib
44	Pengembangan Sistem Informasi Desa (Ops)	Kedungpoh	1	1	18	1	1	1	1	meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Jan - Mar	4.500.000	ADD	✓			Tata Laksana	Wajib
45	honor admin sinkal	Kedungpoh	1	1	9,10,16,18	1	1	1	1	meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Jan - Des	600.000	DDS	✓			Tata Laksana	Wajib
46	Operasional KIM	Kedungpoh	1	1	9,17	1	1	1	1	meningkatkan promosi/potensi desa	Triwulan II	4.815.000	DDS	✓			Kamitua	Wajib
47	Dukungan dan sosialisasi pelaksanaan pilkades	Kedungpoh	14	14	18	14	14	14	14	meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan kalurahan	Jan - Des	80.000.000	ADD	✓			Jagabaya	Prioritas
48	Dukungan dan sosialisasi pelaksanaan pemilihan Bamuskal	Kedungpoh	20	20	18	20	20	20	20	meningkatkan kualitas pemerintahan kalurahan	Juli	15.000.000	ADD	✓			Jagabaya	Prioritas
49	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	Kedungpoh	1	2	9,10,16,18	2	2	2	2	meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Juli, Des	4.220.000	ADD	✓			Pangripta	Wajib

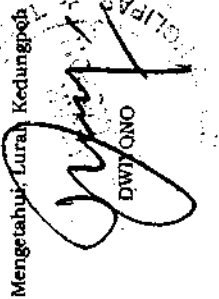
50	Pengisian Staf	Kedungpoh	1	1	17,18	1 ptk	meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Mar - Sept	25.000.000	ADD	✓		Jagabaya	Prioritas
51	Tunjangan Purna Tugas BPD	Kedungpoh	0	1	18	1 ptk	pelayanan kepada masyarakat optimal dan sesuai aturan	semester I	13.950.000	DAIS	✓		Tata Laksana	Prioritas
52	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	Kedungpoh	0	1	18	1 ptk	pengetahuan masyarakat terkait standart pelayanan meningkat	triwulan III	3.000.000	DAIS	✓		Tata Laksana	Wajib
53	Pajak Tanah Kas Kalurahan	Kedungpoh	0	1	9,18	1 ptk	menjadi kalurahan budaya	semester I	1.800.000	DAIS	✓		Jagabaya	Prioritas
54	Sosialisasi terkait Layanan Publik Kalurahan berbasis teknologi informasi.	Kedungpoh	0	1	9,18	1 ptk	peningkatan pemanfaatan teknologi informasi	semester I	5.100.000,00	DAIS	✓		Tata Laksana	Prioritas
		Kedungpoh												
	JUMLAH PER BIDANG 1								1.198.843.755					
1	Insentif Guru PAUD		288	300	4	300 ob	meningkatkan kualitas tenaga pendidikan masyarakat	Jan - Des	72.300.000	DDS	✓		Kamituwa	Wajib
2	Insentif Guru TPA	Kedungpoh	70	70	4	70 ob	meningkatkan kualitas tenaga pendidikan masyarakat	Jan - Des	21.200.000	DDS	✓		Kamituwa	Prioritas
3	Pelatihan/Pembinaan Guru TPA	Kedungpoh	6	12	4	12 ptk	meningkatkan kualitas tenaga pendidikan masyarakat	Jan - Des	1.103.000	DDS	✓		Kamituwa	Prioritas
4	Pemeliharaan Gamelan	Kedungpoh	1	5	9,18	5 ptk	meningkatkan kualitas sdm dan sarpras kebudayaan	Juli	8.000.000	DDS	✓		Ulu-Ulu	Prioritas
5	Honor kader Posyandu Balita	Kedungpoh	1	1	4,9,18	1 ptk	meningkatkan kualitas sdm dan sarpras kebudayaan	Jan - Des	30.000.000	DDS	✓		Kamituwa	Wajib
6	Honor kader Posyandu Lansia	Kedungpoh	1	1	4,9,18	1 ptk	meningkatkan kualitas sdm dan sarpras kebudayaan	Jan - Des	30.000.000	DDS	✓		Kamituwa	Wajib
7	PMT Lansia	Kedungpoh	1	1	4,9,18	1 ptk	meningkatkan kualitas sdm dan sarpras kebudayaan	Jan - Des	6.000.000	DDS	✓		Kamituwa	Prioritas
8	Operasional Posyandu	Kedungpoh	1	2	4,9,18	1 ptk	meningkatkan kualitas sdm dan sarpras kebudayaan	semester 1	5.100.000	DDS	✓		Kamituwa	Prioritas
9	Honor kader ILP	Kedungpoh	50	50	3	50 oa	meningkatkan kualitas kader kesehatan masyarakat	Mar	3.600.000	DDS	✓		Kamituwa	Prioritas

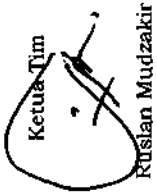
23	Cor Rabat Beton klayar	Kedungpoh	1	1	3	1	1	1	Agust	meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat	19.942.501	DDS	✓		Ulu-Ulu	Prioritas 4
24	Cor Rabat Beton Kedungpoh Kidul	Kedungpoh	23	23	3	23	oa	meningkatkan kualitas kader kesehatan masyarakat	Mar	19.942.501	DDS	✓			Ulu-Ulu	prioritas 2
25	Talud badan Jalan Gojo	Kedungpoh	0	1	9	1	1s	meningkatkan kualitas infrastruktur jalan	April	20.000.000	DDS	✓			Ulu-Ulu	Prioritas 1
26	Talud badan Jalan Nglorog	Klayar	0	1	9	1	1s	meningkatkan kualitas infrastruktur jalan	April	20.000.000	DDS	✓			Ulu-Ulu	Prioritas 5
27	Drainase Kedungpoh lor	Gentungan	0	1	9	1	1s	meningkatkan kualitas infrastruktur jalan	April	20.000.000	DDS	✓			Ulu-Ulu	Prioritas 6
28	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	Kedungpoh Kidul	0	1	9	1s		meningkatkan kualitas infrastruktur jalan	May	10.000.000	DDS	✓			Ulu-Ulu	prioritas
29	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	Mojosari	0	1	9	1	1s	meningkatkan kualitas infrastruktur jalan	April	3.000.000	DDS	✓			Tata Laksana	prioritas
30	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	kedungpoh kulon	0	1	9	1	1s	meningkatkan kualitas infrastruktur jalan	April	3.710.000	DDS	✓			Tata Laksana	prioritas
31	Peningkatan Kapasitas Pengelola Wisata Milik Desa	Kedungpohlor	0	10	1,8,9	2	pkt	meningkatkan upaya pengentasan kemiskinan ekstrim	sept	2.400.000	DDS	✓			Ulu-Ulu	Wajib
	JUMLAH PER BIDANG II	Kedungpoh								370.648.002						
1	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes		1	1	16,18	1	1	pkt	Nop	meningkatkan kualitas tenaga keamanan masyarakat	7.000.000	PBH	✓		Jagabaya	wajib
2	Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	Kedungpoh	1	1	3,15,16,1	1	1	pkt	Nop	meningkatkan kualitas lembaga tangguh bencana	2.000.000	PBH	✓		Jagabaya	wajib

3	Pemberian stimulan kegiatan keagamaan (Pengajian Kalurahan)	Kedungpoh	1	1	1	16,17,18	1 pkt	meningkatkan kualitas lembaga jagawarga	Mei - Sep	3.000.000	dds	✓				Kamituwa	prioritas 3
4	Pengajian Instansi	Kedungpoh	1	1	1	16,17,19	2 pkt	meningkatkan kualitas lembaga jagawarga	Mei - Sep	1.000.000	dds	✓				Kamituwa	prioritas 4
5	Pelatihan Sesorah/Pidato Bahasa Jawa Dais	Kedungpoh	1	1	1	4	1 pkt	meningkatkan kualitas kehidupan beragama	Mar	6.575.000	PBH	✓				Ulu-Ulu	prioritas 1
6	Pelatihan kelompok seni jathil Kedungpoh tengah	Kedungpoh	0	1	1	16	1 pkt	meningkatkan pengembangan potensi olahraga pemuda kalurahan	Juli - Sept	4.000.000	DLL	✓				Ulu-Ulu	Prioritas 5
7	Pelatihan Kelompok seni Karawitan Kedungpoh kulon	Kedungpoh	0	1	1	16	1 pkt	meningkatkan kualitas SDM wasit untuk olah raga sepakbola dan bola volley	April	4.000.000	DDS	✓				Ulu-Ulu	prioritas 6
8	Pelatihan kelompok seni reog Mojosari	Kedungpoh	1	1	1	18	1 pkt	meningkatkan semangat nasionalisme dalam pembangunan kalurahan	Agust	4.000.000	PBH	✓				Ulu-Ulu	prioritas 7
9	Pelatihan kelompok seni tari Kedungpoh lor	Kedungpoh	1	1	1	18	1 pkt	meningkatkan kualitas lembaga kemasyarakatan kalurahan	Jan - Des	4.000.000	ADD	✓				Ulu-Ulu	prioritas 8
10	Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)	Kedungpoh	24	24	24	16,17,18	24 pkt	meningkatkan kualitas KPM	Jan - Des	3.000.000	DDS	✓				Kamituwa	prioritas 2
11	Pelaksanaan peringatan hari besar nasional	Kedungpoh	1	1	1	1,2,3,4,5,6,8,10,11,6	1 pkt	meningkatkan peran pemerintah kalurahan dalam pengentasan kemiskinan	Nop	2.710.000	PBH	✓				Jagabaya	wajib
12	Operasional Karang Taruna	Kedungpoh	1	1	1	17,18	1 pkt	meningkatkan kualitas lembaga kemasyarakatan kalurahan	Jan - Des	2.500.000	PBH	✓				Kamituwa	wajib
13	Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	Kedungpoh	1	1	1	18	1 pkt	meningkatkan kualitas lembaga kemasyarakatan kalurahan	Jan - Des	3.600.000	PBH	✓				Kamituwa	wajib
14	Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)	Kedungpoh	0	1	1	4,9,18	1 pkt	pelestarian budaya	emester II, I		DAIS	✓				Kamituwa	wajib
15	Operasional LPMD dan /atau LPMP	Kedungpoh	0	1	1	4,9,18	12 bin	pelestarian budaya	Jan-Des	2.825.000	DDS	✓				Kamituwa	wajib
16	Operasional PKK	Kedungpoh Lor	0	1	1	4,9,18	12 bin	pelestarian budaya	Jan-Des	4.000.000	DDS	✓				Ulu-Ulu	wajib
	JUMLAH PER BIDANG III	Kedungpoh tengah								4.000.000	DDS	✓				Kamituwa	wajib
										58.210.000							

	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	Kedungpoh	1	1	9,12,15	1	1	1	meningkatkan produksi pangan kalurahan	Feb - April	30.000.000	DDS	✓			Ulu-Ulu	prioritas 4
	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Kedungpoh	0	1	9,12,15	1	1	0	1	1	5.270.000	DDS	✓			Tata Laksana	prioritas 6
	Pembiayaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	Kedungpoh	0	1	9,12,16	1	1	0	1	2	3.000.000	dds	✓			Ulu-Ulu	prioritas 7
	Peningkatan Kapasitas BPD	Kedungpoh	1	1	9,12,15	1	1	1	1	1	3.000.000	DDS	✓			Tata Laksana	prioritas 7
	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	Kedungpoh	1	1	9,12,15	1	1	1	1	1	2.000.000	DDS	✓			kamituwa	prioritas 1
	Pengiriman kelompok dalam promosi/pameran produk usaha masyarakat di tingkat Kecamatan/Daerah/Nasional	Taman Desa	1	1	9,12,15	1	1	1	1	1	7.000.000	DDS	✓			Ulu-Ulu	prioritas 2
	Penyelenggaraan pameran pembangunan/promosi produk usaha masyarakat tingkat desa	Kedungpoh	1	1	2,9,12,15	1	1	1	1	1	10.000.000	DDS	✓			Ulu-Ulu	prioritas 3
	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	Kedungpoh	1	10	2,9,12,15	10	1	1	1	1	1.950.000	DDS	✓			Ulu-Ulu	wajib
	Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	Kedungpoh	1	1	18	1	1	1	1	1	25.000.000	DDS	✓			Ulu-Ulu	prioritas 5
	JUMLAH PER BIDANG IV										87.220.000						
	Kegiatan Penanggulangan Bencana	Kedungpoh	1	1	2,6,13,15	1	1	1	1	1	1.000.000	DDS	✓			Jagabaya	wajib

DESA	2	Penanganan Keadaan Darurat	Kedungpoh	1	1	2,6,13,15	1	1s	meningkatkan kesiapsiagaan pengurangan resiko bencana	Jan - Des	1.300.000	DDS	✓			Jagabaya	wajib
	3	Penanganan Keadaan Mendesak (BLT)	Kedungpoh	1	1	2,6,13,16	2	1s	meningkatkan upaya pengentasan kemiskinan ekstrim dampak bencana		24.000.000	DDS	✓			Kamituwa	wajib
		JUMLAH PER BIDANG IV									26.300.000						
		JUMLAH RENCANA ANGGARAN BELANJA									1.741.221.757						

Mengetahui Lurah Kedungpoh

DWIYONO

Ketua Tim

Ruslan Mudzakir

BERITA ACARA
MUSYAWARAH BERSAMA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN DAN
PEMERINTAH KALURAHAN KEDUNGPOH
PEMBAHASAN PERATURAN KALURAHAN TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN KEDUNGPOH
TAHUN 2027

Dalam rangka penyusunan Peraturan Kalurahan Kedungpoh tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Kedungpoh Tahun 2027, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi DIY maka pada:

Hari dan Tanggal : Selasa, 29 September 2026
J a m : dari pukul 20.00 s.d. selesai
Tempat : Balai Dusun Sinom

Telah diselenggarakan musyawarah bersama yang dihadiri oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Pemerintah Kalurahan Kedungpoh sebagaimana tercantum dalam *lampiran Daftar Hadir*.

Materi atau topik yang dibahas dalam Forum ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah :

A. Materi Bahasan

Materi yang dibahas dalam sidang bersama ini antara lain:

“Rancangan Peraturan Kalurahan Kedungpoh Nomor Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Kedungpoh Tahun Anggaran 2027”

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Rapat : Prapto S dari Bamuskal Kedungpoh
Sekretaris / Notulis : Akhid H dari Bamuskal Kedungpoh
Narasumber : Dwiyono dari Pemkal Kedungpoh

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya seluruh peserta sidang memutuskan dan menyepakati keputusan akhir dari sidang, yaitu :

“Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Kalurahan Kedungpoh Nomor Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Kedungpoh Tahun Anggaran 2027 menjadi Peraturan Kalurahan Kedungpoh Nomor

Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Kedungpoh
Tahun Anggaran 2027”

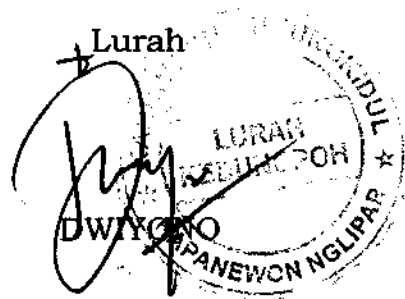
Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung
jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kedungpoh, 29 September 2026

Ketua Bamuskal



Lurah



DAFTAR HADIR

Hari, Tanggal : Sabtu 20-9-2016

Acara : pembiasaan PKK, PjM, perubahan

Tempat : Balai Dusun Sinom .

[illegible]

NOTULEN RAPAT

PEMBAHASAN PENYUSUNAN RKPKAL TAHUN 2027 DAN PERUBAHAN RPJM KALURAHAN KEDUNGPOH

Hari dan Tanggal: Selasa, 29 September 2026

Waktu Pukul: 19.30.00 WIB sampai dengan selesai

Tempat: Ruang Rapat Kantor Kalurahan Kedungpoh

Pimpinan Rapat: Ketua Bamuskal Kedungpoh

Notulis: Sekretaris Bamuskal Kedungpoh

Peserta Rapat: Anggota Bamuskal Kedungpoh, Lurah Kedungpoh beserta Pamong Kalurahan.

Susunan Acara

1. Pembukaan
2. Pengarahan dari Pimpinan Rapat (Ketua Bamuskal)
3. Paparan dan Pembahasan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Tahun 2027
4. Pembahasan Rencana Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal)
5. Tanya Jawab dan Masukan Peserta Rapat
6. Kesimpulan dan Penutup

Jalannya Rapat

Pembukaan

Rapat dibuka oleh Ketua Bamuskal Kedungpoh pada pukul 20.15 WIB dengan mengucapkan basmalah bersama-sama, dilanjutkan dengan pengantar mengenai pentingnya sinkronisasi program pembangunan tahunan dengan arah kebijakan jangka menengah kalurahan.

Pengarahan Pimpinan Rapat

Ketua Bamuskal menyampaikan bahwa rapat pada hari ini berfokus pada dua agenda krusial, yaitu penyusunan draf awal RKPKal Tahun 2027 yang akan menjadi landasan penganggaran tahun depan serta evaluasi mendesak terhadap RPJMKal karena adanya penyesuaian regulasi, perubahan kebijakan nasional/daerah, serta penyesuaian masa jabatan dan target capaian program yang belum terakomodir pada periode sebelumnya.

Pembahasan Penyusunan RKPKal Tahun 2027

Lurah Kedungpoh memaparkan kerangka acuan dan usulan awal kegiatan prioritas untuk tahun anggaran 2027 yang dihipunk dari hasil musyawarah padukuhan. Poin-poin prioritas yang diusulkan meliputi:

Peningkatan infrastruktur pendukung pertanian dan perbaikan jalan usaha tani.

Optimalisasi penanganan stunting dan layanan kesehatan dasar di posyandu kalurahan.

Program pengelolaan sampah tingkat kalurahan seiring dengan penanganan kebersihan lingkungan mandiri.

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui pelatihan UMKM dan Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal).

Pembahasan Perubahan RPJMKal

Terdapat kebutuhan mendesak untuk melakukan perubahan dokumen RPJMKal Kedungpoh. Perubahan ini dilatarbelakangi oleh penyesuaian regulasi pemerintah pusat dan daerah terkait prioritas penggunaan dana desa/kalurahan serta adanya pergeseran kebutuhan mendasar masyarakat yang belum tercantum dalam dokumen perencanaan jangka menengah yang lama. Penyesuaian ini mencakup perbaikan matriks program tahun keempat dan kelima masa bakti yang sedang berjalan agar sinkron dengan RPJMD Kabupaten Gunungkidul.

Tanggapan dan Masukan

Perwakilan anggota Bamuskal memberikan catatan agar setiap usulan infrastruktur pada RKPKal 2027 dilampirkan dengan analisa pemeliharaan jangka panjang agar aset kalurahan tetap terjaga.

LPMK menyarankan agar proses penyusunan draf perubahan RPJMKal melibatkan partisipasi aktif warga melalui musyawarah khusus tingkat padukuhan secara terbatas agar validitas data dukung akurat.

Pamong Kalurahan sepakat untuk segera menyiapkan administrasi pendukung dan draf rancangan peraturan kalurahan terkait perubahan RPJMKal dan RKPKal 2027 sesuai jadwal tahapan perencanaan.

Kesimpulan dan Keputusan Rapat

Bamuskal Kedungpoh menyetujui draf awal perencanaan RKPKal Tahun 2027 dengan catatan penyempurnaan pada rincian anggaran berbasis skala prioritas.

Proses Perubahan RPJMKal Kalurahan Kedungpoh secara resmi disetujui untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan musyawarah perencanaan pembangunan kalurahan (Musrenbangkal).

Pemerintah Kalurahan bersama Bamuskal akan menyusun jadwal tahapan Musrenbangkal perubahan RPJMKal dan penyusunan RKPKal 2027 selambat-lambatnya akhir bulan berjalan.

Penutup

Rapat ditutup oleh Ketua Bamuskal Kedungpoh pada pukul 22.00 WIB dengan ucapan alhamdulillah.

Kedungpoh, 29 September 2026

Notulis



KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KEDUNGPOH

NOMOR 04 TAHUN 2026

Tentang

KESEPAKATAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN ATAS RANCANGAN
PENYUSUNAN RPKAL KALURAHAM KEDUNGPOH TAHUN 2027

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KEDUNGPOH

- Menimbang: Bahwa untuk melaksanakan fungsi dan tugas Bamuskal dalam membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Kalurahan maka perlu ditetapkan Keputusan Bamuskal tentang Kesepakatan Bamuskal atas Rancangan Penyusunan RPKAL Kaluraham Kedungpoh Tahun 2027
- Mengingat: 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- Memperhatikan: Berita Acara Musyawarah Badan Musyawarah Kalurahan bersama Kepala Desa tanggal 29 SEPTEMBER 2026 ;

MEMUTUSKAN:

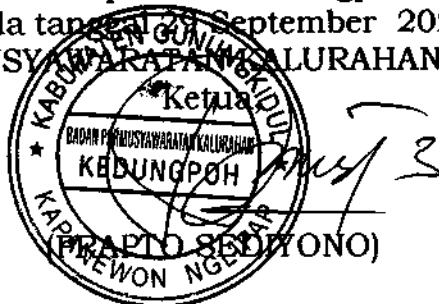
Menetapkan:

KESATU: Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Kedungpoh Nomor 03 Tahun 2026 tentang Hasil Kesepakatan Badan Permusyawaratan Kalurahan Kedungpoh atas Rancangan Penyusunan RPKAL Kaluraham Kedungpoh Tahun 2027

KEDUA: Badan Permusyawaratan Kalurahan Kedungpoh menyatakan **SEPAKAT tanpa perubahan** isi dan atau materi Rancangan Peraturan Kalurahan Kedungpoh Tentang atas Perubahan RPJMKAL Kalurahan Kedungpoh Tahun 2020-2025 Rancangan Penyusunan RPKAL Kaluraham Kedungpoh Tahun 2027 untuk ditetapkan dan diundangkan menjadi Peraturan Kalurahan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA: Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kedungpoh
pada tanggal 29 September 2026
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KEDUNGPOH





PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON NGLIPAR

ꦏꦥꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦤꦒꦭꦶꦥꦂ

Jalan Nglipar-Sambipitu, Nglipar Gunungkidul, 55852 Telp/Fax :
Laman nglipar.gunungkidulkab.go.id; Posel nglipar@gunungkidulkab.go.id

Nglipar, 29 September 2026

Nomor : B/100.3.4.3/181/2026
Sifat : Segera
Lampiran : 1 bendel
Hal : Hasil Evaluasi Rancangan RPK Kalurahan Kedungpoh Tahun 2027

Yth. Sdr. Lurah Kedungpoh
di
Kedungpoh

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor 100.3/384 tanggal 18 September 2026 perihal Permohonan Evaluasi Rancangan Produk Hukum, dan setelah mencermati Dokumen Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Kedungpoh Tahun 2027 serta ketentuan peraturan perundang-undangan dan Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 54 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2027, maka disampaikan Hasil Evaluasi Rancangan RPK Kalurahan Kedungpoh Tahun 2027 sebagaimana terlampir.

Demikian surat ini disampaikan untuk menjadikan perhatian dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Panewu Nglipar,



Sugito, SH, MH.
Pembina Tk.I, Gol. IV/b
NIP 196907271993031004

Kapanewon Nglipar Kabupaten Gunungkidul tidak menerima suap, dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat bukti pelanggaran tersebut, silahkan lapor melalui UPG Gunungkidul *Hotline* SIGRAK : 082324675656

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LEMBAR KERJA EVALUASI RKP KALURAHAN

Kalurahan
Kapanewon
Kabupaten
Tahun

: Kedungpoh
: Nglipar
: Gunungkidul
: 2027

No.	Aspek dan Indikator Evaluasi	Bobot Item	Nilai	Skor Terlambaya maks.100	Catatan Analisis Bukti Obyektif	Rekomendasi Perbaikan
			1-100	5		7
1	2	3	4	5	6	7
A	Administrasi Proses RKP Kal	20%	500	20,00		
A 1	Tahapan penyusunan (Muskal, pencermatan RPJM Kalurahan, Musrenbangkal) terdokumentasi lengkap dengan Berita Acara & Daftar Hadir	4%	100	4,00	Dokumentasi Pelaksanaan Muskal, Pencermatan RPJM Kal dan Musrenbangkal telah dilampirkan saat evaluasi di Kapanewon	Pemerintah Kalurahan agar menjaga konsistensi penyediaan dan pengarsipan bukti dukung pelaksanaan Muskal, pencermatan RPJM Kal, dan Musrenbangkal sebagai bagian dari pemenuhan tertib administrasi perencanaan pembangunan kalurahan.
A 2	Keterlibatan unsur, lembaga kalurahan, tokoh masyarakat, perempuan, kader kesehatan, dan KPM (Kader Pembangunan Manusia) dan lainnya. Serta keterlibatan perempuan mencapai minimal 30%.	4%	100	4,00	Lembaga dan Tokoh Masyarakat termasuk keterwakilan unsur Perempuan telah sesuai dengan ketentuan yang dibuktikan dengan copy Daftar Hadir Muskal, Pencermatan RPJM Kal dan Musrenbangkal saat evaluasi di Kapanewon	Pemerintah Kalurahan agar mempertahankan keterwakilan unsur lembaga dan tokoh masyarakat dalam Muskal, Pencermatan RPJM Kal, dan Musrenbangkal sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan konsistensi penerapannya pada setiap tahapan perencanaan.
A 3	Dokumen RKP Kalurahan disusun dan dievaluasi tepat waktu sebelum batas akhir penetapan RKP Kalurahan TA 2027.	4%	100	4,00	Pemohonan Evaluasi Dokumen RKP Kalurahan disampaikan pada tanggal 18 September 2026	Pemerintah Kalurahan agar menjaga konsistensi kepatuhan terhadap tenggat waktu penyampaian permohonan evaluasi dokumen RKP Kalurahan pada setiap siklus perencanaan.
A 4	Dokumen lampiran RKP Kal lengkap dan sesuai.	4%	100	4,00	Dokumen Lampiran RKP Kal disampaikan lengkap saat permohonan Evaluasi Kapanewon	Pemerintah Kalurahan agar menjaga konsistensi penyampaian dokumen lampiran RKP Kal secara lengkap dan tepat sesuai persyaratan evaluasi yang ditetapkan.
A 5	Surat Keputusan Lurah tentang Tim Penyusun RKP Kal telah ditetapkan tepat waktu.	4%	100	4,00	SK Lurah tentang Tim Penyusun RKP Kalurahan telah dilampirkan dan sesuai dengan tata waktu yang ditetapkan	Mempertahankan ketepatan waktu penetapan SK Lurah tentang Tim Penyusun RKP Kalurahan sesuai ketentuan yang berlaku.
B	Substansi Sistematis RKP Kal	80%	1164	70,25		
B 1	BAB 1 PENDAHULUAN	10%	310	7,60		
B 1 1	a. Latar Belakang	1%	80	0,80	Latar Belakang belum menguraikan kondisi pembangunan dan perencanaan Kalurahan saat ini, belum menekankan perencanaan berbasis data dan kebutuhan masyarakat serta belum mengaitkan penyusunan RKP Kal dengan pembangunan Kalurahan yang berkelanjutan.	Uralkan lebih lanjut tentang hasil evaluasi pembangunan, data dan informasi pembangunan Kalurahan, kebutuhan masyarakat, serta perkembangan peraturan perundang-undangan

B 1 2	b. Dasar Hukum	1%	65	0,65	Terdapat Dasar Hukum yang tidak relevan dan beberapa Dasar Hukum dicantumkan dengan tidak sesuai ketentuan	Melakukan penyesuaian dan pembaruan dasar hukum dengan menghapus ketentuan yang sudah tidak relevan serta memastikan seluruh dasar hukum yang dicantumkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan substansi dokumen.
B 1 3	c. Tujuan	1%	90	0,90	Maksud dan tujuan penyusunan RKP Kalurahan belum sepenuhnya menegaskan keterkaitan RKP Kalurahan sebagai penjabaran tahunan RPJM Kalurahan serta penyesuaian dengan prioritas pembangunan daerah dan nasional.	Melakukan penyempurnaan substansi dan redaksi maksud serta tujuan penyusunan RKP Kalurahan guna menegaskan fungsi RKP Kalurahan sebagai penjabaran tahunan RPJM Kalurahan dan memastikan keselarasannya dengan prioritas pembangunan daerah, regional, serta kebijakan pembangunan nasional yang berlaku.
B 1 4	d. Visi dan Misi Kalurahan	7%	75	5,25	belum terdapat penjelasan visi, penjelasan masing-masing misi, serta arah kebijakan/ bidang prioritas pembangunan	Melengkapi uraian penjelasan visi, penjelasan masing-masing misi, serta menambahkan arah kebijakan atau bidang prioritas pembangunan Tahun 2027 sebagai penjabaran misi.
B 2	BAB II GAMBARAN UMUM DAN KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN	20%	375	15,00		
B 2 1	a. Gambaran Umum dan Potensi Wilayah	10%	75	7,50	Telah diuraikan namun belum lengkap dan terperinci atas beberapa data, misal data kemiskinan, kesehatan, infrastruktur dasar dsb sebagai data dasar pelaksanaan kegiatan yang direncanakan.	Gambaran Umum perlu dilengkapi dengan data demografi yang lebih rinci (struktur umur, kepadatan dan migrasi penduduk), data kesehatan dan kemiskinan, data jaringan infrastruktur dasar, informasi tata kelola pemerintahan kalurahan, serta data keuangan kalurahan agar seluruh unsur yang dipersyaratkan dalam pedoman dapat terpenuhi secara lengkap.
B 2 2	b. Kebijakan Keuangan Kalurahan	2,50%	75	1,88	Pada bagian ini banyak berisi uraian teknis, regulasi, dan rincian sumber pendapatan, sedangkan pedoman menghendaki narasi kebijakan yang menjelaskan pentingnya pendapatan, arah kebijakan peningkatan pendapatan, upaya yang akan dilakukan, dan manfaat yang diharapkan bagi pembangunan kalurahan.	Tambahkan uraian mengenai pentingnya pendapatan bagi pembangunan kalurahan, arah kebijakan peningkatan pendapatan setiap tahun, strategi optimalisasi sumber pendapatan (aset, BUMKAL, kerja sama, dan administrasi), serta manfaat peningkatan pendapatan terhadap perluasan program pembangunan dan pelayanan masyarakat
B 2 3	1. Kebijakan Pendapatan Kalurahan	2,50%	75	1,88	Pada bagian Kebijakan Pendapatan Kalurahan belum memenuhi seluruh unsur yang dipersyaratkan SE Bupati 54/2026, khususnya terkait prinsip pengelolaan anggaran, hasil yang diharapkan serta serta matriks bidang/subbidang/kegiatan tiga tahunan.	Perlu dilengkapi dengan prinsip pengelolaan anggaran, hasil yang diharapkan dari belanja kalurahan, serta matriks bidang/subbidang/kegiatan tiga tahunan

B 2 4	2. Kebijakan Belanja Kalurahan	2,50%	70	1,75	telah memuat uraian mengenai kebijakan belanja kalurahan dan prioritas pembangunan tahun 2027. Namun, dokumen belum sepenuhnya memenuhi pedoman, khususnya terkait penegasan prinsip pengelolaan anggaran, uraian hasil yang diharapkan dari belanja kalurahan, serta penyajian matriks bidang, subbidang, dan kegiatan dalam rentang waktu tiga tahun.	Perlu dilengkapi dengan prinsip pengelolaan anggaran, hasil yang diharapkan dari belanja kalurahan, serta matriks bidang/subbidang/ kegiatan tiga tahunan
B 2 5	3. Kebijakan Pembiayaan Kalurahan	2,50%	80	2,00	Pada bagian Kebijakan Pembiayaan Kalurahan belum menguraikan arah kebijakan pembiayaan, pemanfaatan SILPA, dan manfaat pembiayaan bagi pembangunan kalurahan	Menambahkan narasi mengenai fungsi pembiayaan dalam pengelolaan keuangan kalurahan, arah kebijakan pemanfaatan pembiayaan termasuk SILPA untuk mendukung program prioritas, serta manfaat pembiayaan guna menjaga keberlanjutan pembangunan dan kesehatan fiskal kalurahan
B 3	BAB III EVALUASI KEGIATAN PEMBANGUNAN	20%	189	18,90		
B 3 1	a. Evaluasi Pelaksanaan Program RPKKalurahan tahun lalu	10%	95	9,50	Dokumen pada prinsipnya telah memenuhi substansi pedoman, namun perlu dilengkapi dengan uraian yang lebih eksplisit mengenai kegiatan yang belum optimal beserta penyebab dan dampaknya, serta disajikan matriks evaluasi kegiatan untuk memperkuat keterlacakan hasil evaluasi dan tindak lanjut	Tambahkan penjelasan kegiatan yang belum optimal, hubungan penyebab-dampak kendala, serta matriks evaluasi kegiatan.
B 3 2	b. Identifikasi masalah berdasarkan RPKMKalurahan dan Prioritas Pembangunan	10%	94	9,40	Belum disajikan perbandingan antara capaian/kondisi eksisting dengan target RPKM Kalurahan serta amun belum secara tegas menyatakan bahwa masalah dengan dampak terbesar dipilih sebagai prioritas pembangunan tahun berikutnya	Melakukan penyempurnaan narasi dengan menyajikan gap analysis terhadap target RPKM Kalurahan dan memperjelas keterkaitan permasalahan prioritas dengan dampak terbesar yang ditimbulkan.
B 4	BAB IV PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN KALURAHAN TAHUN 2027	20%	95	19,00	Telah sesuai	Dokumen telah sesuai dengan ketentuan pedoman, uraian fokus bidang agar lebih menekankan arah kebijakan strategis.
B 5	BAB V PENUTUP	5%	100	5,00	Telah selaras dengan ketentuan pedoman, serta telah memuat unsur pedoman dan komitmen pelaksanaan program pembangunan selama satu tahun anggaran secara memadai.	Pertahankan kesesuaian dokumen dan lakukan penyempurnaan redaksional minor
B 6	Lampiran-Lampiran	5%	95	4,75	Lampiran-Lampiran telah sesuai	Agar tetap memastikan kesesuaian dan kelengkapannya
	TOTAL	100%	1.884	90,25		
KESIMPULAN ATAS EVALUASI RPKKalurahan ini					80	

1. Aspek administrasi penyusunan RKP Kalurahan telah memenuhi ketentuan, dengan kelengkapan dokumen, keterlibatan unsur masyarakat, dan kepatuhan terhadap tahapan serta jadwal yang ditetapkan.
2. Substansi dokumen pada umumnya telah sesuai, namun masih terdapat beberapa bagian yang perlu disempurnakan, terutama pada latar belakang, dasar hukum, visi dan misi, serta gambaran umum dan kebijakan keuangan kalurahan.
3. Analisis evaluasi pembangunan dan identifikasi permasalahan perlu diperkuat agar keterkaitannya dengan target RPJM Kalurahan dan prioritas pembangunan lebih jelas dan terukur.
4. Pada dokumen Peraturan Kalurahan, masih terdapat beberapa bagian yang perlu disempurnakan, meliputi:
 - a. Konsiderans, agar disesuaikan dengan maksud dan tujuan pembentukan peraturan serta kaidah penyusunan produk hukum.
 - b. Dasar Hukum, agar ditelaah kembali untuk memastikan kesesuaian, relevansi, dan keterkaitannya dengan materi muatan yang diatur.
5. Secara Keseluruhan, dokumen memperoleh nilai 90,25 dengan kategori Sangat Layak, sehingga dapat ditindaklanjuti dengan penyempurnaan pada aspek substansi dokumen.
6. Secara umum, diperlukan penyempurnaan redaksional guna meningkatkan kesesuaian dengan tata naskah dan tata bahasa formal.

Panewu Nglipar,



Sugito, SH, MH.
Pembina Tk.I, Gol. IV/b
NIP 196907271993031004